



**PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
PADA BEBERAPA KABUPATEN DI PROVINSI
SUMATERA UTARA TAHUN 2014-2016**

SKRIPSI

*Diajukan untuk melengkapi Tugas dan Salah Satu Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Akuntansi Syariah*

Oleh:

**NUR AINUN
NIM. 1440200211**

JURUSAN EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN)PADANGSIDIMPUAN
2018**



**PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
PADA BEBERAPA KABUPATEN DI PROVINSI
SUMATERA UTARA TAHUN 2014-2016**

SKRIPSI

*Diajukan untuk melengkapi Tugas dan Salah Satu Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Akuntansi Syariah*

Oleh:

**NUR AINUN
NIM. 1440200211**

JURUSAN EKONOMI SYARIAH

PEMBIMBING I

**Dr. Ikhwanuddin Harahap, M. Ag
NIP. 19750103 200212 1 001**

PEMBIMBING II

**Delima Sari Lubis, M.A
NIP. 19840512 201403 2 002**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN)PADANGSIDIMPUAN
2018**

**Dr. Ikhwanuddin Harahap, M. Ag
NIP. 19750103 200212 1 001**

**Delima Sari Lubis, M.A
NIP. 19840512 201403 2 002**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. H. Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan 22733
Telp.(0634) 22080 Fax.(0634) 24022

Hal : Lampiran Skripsi
a.n. Nur ainun
Lampiran : 6 (Enam) Eksemplar

Padangsidimpuan, 30 April 2018

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

IAIN Padangsidimpuan

Di-

Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. Nur ainun yang berjudul "**Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Beberapa Kabupaten Provinsi Di Sumatera Utara Tahun 2014-2016**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Ilmu Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikianlah kami sampaikan atas perhatian dan kerja sama dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag
NIP.19750103 200212 1 001

PEMBIMBING II

Delima Sari Lubis, M.A
NIP.19840512 201403 2 002

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NUR AINUN
NIM : 1440200211
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : **Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Beberapa Kabupaten Di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014-2016.**

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing, dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 30 April 2018
Saya yang Menyatakan,



NUR AINUN
NIM : 1440200211

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan,
saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NUR AINUN
NIM : 1440200211
Jurusan : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA BEBERAPA KABUPATEN DI PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2014-2016**. Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidimpuan
Pada tanggal : 30 April 2018
Yang menyatakan,



**NUR AINUN
NIM. 1440200211**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl.H. Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan 22733
Tel.(0634) 22080 Fax.(0634) 24022

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : NUR AINUN
NIM : 14 402 00211
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : **PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
PADA BEBERAPA KABUPATEN DI PROVINSI
SUMATERA UTARA TAHUN 2014-2016.**

Ketua

Dr. Darwis Harahap, S.HI., M.Si
NIP.19780818 200901 1 015

Sekretaris

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag
NIP. 19750103 200212 1 001

Anggota

Dr. Darwis Harahap, S.HI., M.Si
NIP.19780818 200901 1 015

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag
NIP. 19750103 200212 1 001

Delima Sari Lubis, M.A
NIP. 19840512 201403 2 002

Azwar Hamid, M.A
NIP. 19860311 201503 1 005

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah :

Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : Kamis, 07 Juni 2018
Pukul : 13.00 WIB s/d 15.00 WIB
Hasil/ Nilai : Lulus/ 77,5 (B)
IPK : 3,76
Predikat : Cumlaude



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. H. Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan 22733
Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA BEBERAPA KABUPATEN DI PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2014-2016.

NAMA : NUR AINUN
NIM : 14 402 00211

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam Bidang Ekonomi Syariah



Padangsidimpuan, 06 Juli 2018
Dekan

Dr. Darwis Harahap, S.HI., M.Si
NIP. 19780818 200901 1 015

KATA PENGANTAR



Assalamu' alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji dan syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kesehatan dan segala nikmat kepada penulis sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Serta syalawat dan salam kepada Rasulullah SAW yang telah membawa ummatnya dari alam yang penuh dengan kebutaan ilmu pengetahuan menuju alam yang disinari oleh ilmu pengetahuan.

Untuk menyelesaikan perkuliahan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan, maka menyusun skripsi merupakan salah satu tugas akhir yang harus diselesaikan untuk mendapat gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada bidang Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Skripsi ini berjudul:” **Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Beberapa Kabupaten Di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014-2016**”.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat memberikan yang terbaik, akan tetapi peneliti menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Hal ini terjadi karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Namun berkat bimbingan, petunjuk, arahan, dan nasehat dari semua pihak, baik

secara langsung maupun tidak langsung sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Maka dari itu peneliti ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL sebagai Rektor IAIN Padangsidempuan, serta Bapak Dr. H. Darwis Dasopang, M.Ag. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar Nasution M.Ag. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan , dan Bapak Dr. Sumper Mulia Harahap, M.Ag, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Bapak Dr. Darwis Harahap, SHI., M.Si sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan, Abdul Nasser Hasibuan, S.E., M.Si sebagai wakil dekan bidang akademik dan pengembangan lembaga, Bapak Drs. Kamaluddin M. Ag sebagai Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Ibu Delima Sari Lubis MA sebagai Ketua Prodi Ekonomi Syariah dan seluruh civitas akademika IAIN Padangsidempuan yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidempuan.
4. Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag, sebagai dosen pembimbing I, penulis ucapkan banyak terimakasih yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bantuan, semangat, bimbingan dan pengarahan dalam penelitian skripsi ini.Semoga Allah SWT membalas setiap kebaikan yang telah bapak berikan.

5. Ibu Delima Sari Lubis, MA sebagai dosen pembimbing II, penulis ucapkan banyak terimakasih, yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk yang sangat berharga bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas setiap kebaikan yang telah ibu berikan.
6. Bapak Kepala Perpustakaan serta pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak serta Ibu Dosen IAIN Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan, arahan dan masukan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidempuan.
8. Teristimewa kepada keluarga tercinta (Ayahanda Gusnar dan Ibunda tercinta Nur naningsih) yang telah membimbing dan selalu berdoa yang tiada henti-hentinya, serta berjuang demi kami anak-anaknya hingga bisa menjadi apa yang di harapkan. Terimakasih doa dari abang, (Pebriman), adik (Restu Hidayat), dan Muhammad Hakim yang berjasa dalam hidup Peneliti yang telah banyak berkorban serta memberikan dukungan moral dan material demi kesuksesan Peneliti. Do'a dan usahanya yang tidak mengenal lelah memberikan dukungan dan harapan dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah senantiasa dapat membalas perjuangan mereka dengan surga firdaus-Nya.
9. Serta teman-teman seperjuangan angkatan 2014 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam khususnya ES V akuntansi Keuangan I. Terutama untuk sahabat-sahabat

saya, Pikek Amelia, Resky Sahreni, Meli Saputri, Lisa Suriani, Syarifah Aini, Rosa Adelina Pasaribu, Siti Kholija, Ayu Anggita, Dewi Sartini, Zuraidah yang telah memberikan dukungan serta bantuan, semangat dan do'a kepada peneliti agar tak berputus asa dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Dan terima kasih juga untuk persahabatan dan diskusinya selama ini serta pihak-pihak yang tidak dapat saya tulis satu persatu yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, peneliti menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan ilmu yang dimiliki peneliti serta kemampuan peneliti yang jauh dari cukup. Untuk itu, peneliti dengan segala kerendahan hati kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Semoga Allah SWT memberi dan melindungi kita semua, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Padangsidempuan, 23 Mei 2018
Peneliti,

Nur Ainun
Nim: 14 402 00211

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan bahasa ‘Arab ke bahasa Latin.

Penulisan transliterasi ‘Arab Latin di sini menggunakan transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan No. 0543 b/ U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistim tulisan arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es
ص	šad	š	esdan ye

ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamza h	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	fathah	A	A
— /	Kasrah	I	I
— و	ḍommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
.....ي	fathah dan ya	Ai	a dan i
و.....	fathah dan wau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ.....	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
اِ.....	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
اُ.....	dommah dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua.

- Ta' marbutah hidup yaitu Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dommah, transliterasinya adalah /t/.
- Ta' marbutah mati yaitu Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ا. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata atau kalimat

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, mau pun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

ABSTRAK

Nama : Nur Ainun

Nim : 14402 00211

Judul : Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Beberapa Kabupaten Di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014-2016.

Latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah terjadinya fluktuasi (naik/turun) pada retribusi daerah sedangkan pajak daerah mengalami penurunan pada daerah tertentu dan pendapatan asli daerah selalu meningkat pada kurun waktu 2014-2016. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pajak daerah dan retribusi daerah memberikan pengaruh terhadap pendapatan asli daerah baik secara parsial maupun simultan pada beberapa kabupaten di provinsi Sumatera Utara tahun 2014-2016.

Pembahasan penelitian ini berkaitan dengan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah. Pendekatan yang dilakukan dihubungkan dengan teori Abdul Halim dan Syam Kusufi menyatakan bahwa dengan adanya Undang-Undang pajak daerah dan retribusi daerah potensi penerimaan kabupaten atau kota akan semakin besar sesuai dengan kewenangan kabupaten atau kota dan teori menurut Budi Waluyo yang menyatakan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah mempunyai keterkaitan yang erat dengan jasa pelayanan yang disediakan pemerintah daerah kepada masyarakat sehingga pertumbuhan perekonomian ikut mendorong penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah..

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan bentuk data panel sebanyak 30 sampel. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik studi pustaka dan teknik dokumentasi yang ada di situs resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara. Teknik analisis data dengan uji statistik deskriptif, uji normalitas, uji analisis data panel, uji hipotesis yaitu uji t, uji F, uji determinasi (R^2), uji asumsi klasik, analisis regresi berganda. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan alat bantu statistik yaitu Eviews 9 dengan data pengujian statistiknya merupakan data panel yang merupakan kombinasi dari data *cross section* dan *time series*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pajak daerah (X_1) berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah karena nilai t_{hitung} (3.918) > t_{tabel} (1.703). variabel retribusi daerah (X_2) tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah karena nilai t_{hitung} (-1.101) < t_{tabel} (-1.703). Secara simultan variabel pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah karena nilai F_{hitung} (7,75) > F_{tabel} (2,96). Sedangkan nilai dari koefisien Determinasi (R^2) sebesar 0,36 atau sama dengan artinya 36%. Artinya bahwa pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah sebesar 36% sedangkan sisanya 64% (100%-36%) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

Kata Kunci : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Asli Daerah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	v
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GRAFIK.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	10
C. Batasan Masalah	10
D. Definisi Operasional Variabel	11
E. Rumusan Masalah.....	11
F. Tujuan Penelitian.....	12
G. Kegunaan Penelitian	12
H. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Kerangka Teori	16
1. Pendapatan Asli Daerah.....	18
a. Definisi Pendapatan Asli Daerah.....	
b. Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah.....	
2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah	23
3. Pendapatan Asli Daerah Dalam Pandangan Islam.....	22
4. Pajak Daerah	24
a. Definisi Pajak.....	
b. Syarat Pemungutan Pajak	
c. Jenis Pajak Provinsi	
d. Jenis Pajak kabupaten/kota	
5. Pajak Dalam Pandangan Islam.....	29
6. Retribusi Daerah	31
a. Definisi Retribusi Daerah	

b. Jenis-Jenis Retribusi daerah.....	
B. Penelitian Terdahulu.....	34
C. Kerangka Pikir.....	38
D. Hipotesis.....	39

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	41
B. Jenis Penelitian.....	41
C. Populasi dan Sampel.....	42
1. Populasi.....	42
2. Sampel.....	42
D. Sumber Data.....	43
E. Teknik Pengumpulan Data.....	44
F. Teknik Analisis Data.....	40
1. Analisis Deskriptif.....	45
2. Uji Normalitas.....	46
3. Uji Pemilihan Model.....	46
a. <i>Ordinary Least Square</i>	46
b. <i>Fixed Effet</i>	47
c. <i>Random Effect</i>	47
4. Asumsi Klasik.....	47
a. Multikolinieritas.....	48
b. Uji Heterokedastisitas.....	48
c. Uji Autokorelasi.....	48
5. Analisis Hipotesis.....	49
a. Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t).....	49
b. Uji koefisien Regresi Secara Simultan (Uji F).....	50
c. Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	46
d. Analisis Regresi Berganda.....	51

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Provinsi Sumatera Utara.....	53
1. Sejarah Provinsi Sumatera Utara.....	54
2. Kondisi Geografis.....	51
B. Gambaran Umum Data Penelitian.....	56
1. Pendapatan Asli Daerah.....	56
2. Pajak Daerah.....	58
3. Retribusi Daerah.....	59
C. Hasil Analisis Data.....	61
1. Analisis Statistik Deskriptif.....	61
2. Uji Normalitas.....	62
3. Uji Pemilihan Model.....	63

a. <i>Ordinary Least Square</i>	63
b. Model efek tetap (<i>common effect</i>).....	64
c. <i>Random Effect</i>	66
4. Uji Asumsi Klasik	69
a. Uji Multikolinieritas.....	69
b. Uji Heterokedastisitas	70
c. Uji Autokorelasi	71
5. Uji Hipotesis dengan Analisis Regresi Data Panel	72
a. Uji Parsial (Uji t)	72
b. Uji Simultan (Uji F).....	73
c. Uji Koefisien Determinasi (R^2)	74
d. Analisis Regresi Linear Berganda	75
6. Pembahasan Hasil Penelitian	76
7. Keterbatasan Penelitian.....	80

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	82
B. Saran.....	83

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Pendapatan Asli Daerah tahun 2014-2016.....	4
Tabel I.2	Pajak Daerah tahun 2014-2016.....	6
Tabel I.3	Retribusi Daerah	7
Tabel I.4	Definisi Operasiona IVariabel	11
Tabel II.1	Penelitian Terdahulu	34
Tabel IV.1	Statistik Deskriptif	61
Tabel IV.2	Uji Normalitas.....	62
Tabel IV.3	Model Regresi <i>Common Effect</i>	63
Tabel IV.4	Model Regresi <i>Fixed Effect</i>	64
Tabel IV.5	Hasil Uji <i>Chow</i>	65
Tabel IV.6	Model <i>Regresi Random Effect</i>	66
TabelIV.7	Hasil Uji Hausman.....	67
Tabel IV. 8	Hasil Uji Multikolinearitas	69
Tabel IV.14	Hasil Uji <i>White</i>	70
Tabel IV.15	Hasil Uji Autokorelasi	71
Tabel IV.16	Hasil uji t.....	72
Tabel IV.17	Hasil Uji F.....	74
Tabel IV.18	Hasil Uji R^2	74
Tabel IV.19	Hasil Uji Regresi Linear Berganda.....	75

DAFTAR GRAFIK

Gambar IV.1 Pendapatan Asli Daerah	57
Gambar IV.2 Pajak Daerah	58
Gambar IV.3 Retribusi Daerah	60

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bagi pemerintah daerah, penerimaan pajak yang terpenting dan dominan adalah bersumber dari pajak bangunan, hiburan/tontonan, dan pajak reklame. Selain itu, pajak bumi dan bangunan pada dasarnya merupakan penerimaan bagi hasil dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Oleh karena itu, pajak bumi dan bangunan sering bersama-sama dengan Pendapatan Asli Daerah di kategorikan sebagai penerimaan daerah sendiri.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menjelaskan bahwa pajak dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Pembiayaan pemerintah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Kebutuhan ini semakin dirasakan daerah terutama sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia, yaitu mulai tanggal 1 Januari 2001.¹ Dengan adanya otonomi daerah, diharapkan daerah mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, disamping penerimaan yang berasal dari pemerintah berupa subsidi/bantuan dan bagi hasil pajak. Sumber pendapatan daerah tersebut diharapkan menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan meratakan kesejahteraan.

¹Marihot, *Pajak dan Retribusi Daerah* (Yogyakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 1.

Dilihat dari sifatnya, maka pajak daerah dan retribusi daerah termasuk dalam kategori sumber keuangan daerah yang bersifat konvensional. Pajak daerah merupakan instrumen keuangan konvensional yang sering digunakan di banyak negara. Penerimaan pajak digunakan untuk membiayai prasarana dan pelayanan perkotaan yang memberikan manfaat bagi masyarakat umum yang biasa disebut juga sebagai *public goods*. Begitu juga dengan retribusi daerah, pengenaan retribusi sangat erat kaitannya dengan prinsip pemulihan biaya (*cost recovery*). Dengan demikian, retribusi ini ditujukan untuk menutupi biaya operasi, pemeliharaan, depresiasi, dan pembayaran hutang. Adapun tarif retribusi umumnya bersifat proporsional, dimana tarif yang sama diberlakukan untuk seluruh konsumen. Namun, di beberapa daerah maju besarnya retribusi jasa dan prasarana tertentu, seperti pelayanan air bersih cenderung bersifat progresif, di mana semakin banyak konsumsi air bersih akan semakin tinggi tarif retribusinya.²

Selain itu, pada sektor pemungutan pajak dan retribusi daerah masih adanya kelemahan, khususnya di dalam sirkulasi kas daerah. Kelemahan ini terjadi akibat merosotnya kredibilitas pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan karena adanya indikasi KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) serta buruknya kualitas pelayanan publik. Ini merupakan kenyataan bahwa penyelenggaraan pemerintahan berlangsung tidak sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai.

²Adrian Sutedi, *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah* (Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2008), hlm. 5-11.

Sirkulasi pendapatan asli daerah sendiri masih lemah dan perlu koreksi yang mendasar. Pengelolaan kekayaan daerah tidak memperhatikan eksistensi dan kelangsungan hidup masyarakat sehingga diperlukan perencanaan yang strategis dalam pengelolaan keuangan daerah, agar tidak mengganggu target pendapatan asli daerah. Berikut ini adalah data pendapatan asli daerah beberapa Kabupaten provinsi Sumatera Utara tahun 2014-2016. Adapun alasan peneliti memilih sepuluh Kabupaten ini dilihat dari beberapa hal yaitu, sumber daya manusia yang tinggi, tingkat partisipasi angkatan kerja di yang tinggi di beberapa Kabupaten, jumlah penduduk, pertumbuhan penduduk yang tinggi, luas wilayah/area yang dimiliki meliputi perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, dan pertanian, wilayah administrasi dilihat dari banyaknya kecamatan, desa, dan kelurahan.

Tabel 1.1
Pendapatan Asli Daerah Tahun 2014-2016
(dalam rupiah)

No.	Kabupaten	Pendapatan Asli Daerah		
		2014	2015	2016
1.	Nias	44.641.875.000	63.227.700.000	69.414.470.000
2.	Mandailing Natal	50.000.000.000	65.750.595.000	85.508.995.000
3.	Tapanuli Selatan	77.252.840.000	98.438.746.000	90.666.249.000
4.	Tapanuli Tengah	32.447.191.000	47.720.446.000	64.005.291.000
5.	Tapanuli Utara	36.990.862.000	50.000.000.000	67.183.704.000
6.	Toba Samosir	23.408.574.000	34.197.975.000	37.451.580.000
7.	Labuhan Batu	85.350.446.000	146.290.701.000	161.886.178.000
8.	Asahan	59.129.772.000	71.225.889.000	104.816.668.000
9.	Simalungun	110.000.000.000	112.414.289.000	119.980.275.000
10.	Dairi	24.331.000.000	60.481.900.000	75.647.999.000

Sumber : Sumatera Utara dalam Angka 2016 (diolah)

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa pada tahun 2014 pendapatan asli daerah yang tertinggi adalah di Kabupaten Simalungun sebesar Rp 110.000.000.000, sedangkan untuk pendapatan asli daerah yang terendah adalah di Kabupaten

Toba Samosir sebesar Rp 23.408.574.000. Pada tahun 2015 pendapatan asli daerah tertinggi terdapat pada Kabupaten Labuhan Batu sebesar Rp 146.290.701, sedangkan yang terendah pendapatan asli daerah nya juga di Kabupaten Toba Samosir dengan perolehan sebesar Rp 34.197.975.000 Selanjutnya pada tahun 2016 pendapatan asli daerah yang tertinggi juga di Kabupaten Labuhan Batu sebesar Rp 161.886.178.000. Sedangkan pendapatan asli daerah yang terendah juga Kabupaten Toba Samosir sebesar Rp 37.451.580.000.

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menjelaskan bahwa pajak dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Dengan adanya otonomi daerah, diharapkan agar daerah dapat melaksanakan otonominya, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, di samping penerimaan yang berasal dari pemerintah berupa subsidi/bantuan dan bagi hasil pajak. Sumber pendapatan daerah tersebut diharapkan menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan meratakan kesejahteraan masyarakat.

Kemampuan keuangan daerah perlu dilakukan dengan kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan retribusi dan pajak daerah. Namun demikian, kekuatan pembaruan yang diajukan sebagai strategi barunya ialah pada penerapan manajemen pengelolaan dan audit kinerjanya. Dengan penerapan manajemen pengelolaan yang modern dan audit kinerja yang objektif,

maka akan berdampak pada efisiensi, transparansi, dan efektivitas untuk menutup kebocoran Pendapatan Daerah³. Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah tersebut juga akan direncanakan dengan selalu mempertimbangkan keseimbangan objek pajak dan retribusi, dengan koefisien beban yang ditanggung masyarakat. Berikut adalah data pajak daerah periode 2014-2016.

Tabel 1.2
Pajak Daerah (Dalam rupiah)

No	Kabupaten	Pajak Daerah		
		2014	2015	2016
1	Nias	3.443.000.000	4.203.000.000	4.547.870.000
2	Mandailing Natal	20.128.000.000	19.330.000.000	19.330.000.000
3	Tapanuli Selatan	11.419.000.000	24.315.707.000	27.940.052.000
4	Tapanuli Tengah	11.462.429.000	12.154.983.000	13.638.019.000
5	Tapanuli Utara	4.366.126.000	9.510.525.000	10.030.000.000
6	Toba Samosir	6.225.683.000	11.698.367.000	12.048.367.000
7	Labuhan Batu	29.059.600.000	62.700.000.000	62.700.000.000
8	Asahan	28.168.310.000	31.241.119.000	42.930.000.000
9	Simalungun	33.132.095.000	80.716.255.000	50.525.000.000
10	Dairi	7.226.000.000	7.766.000.000	8.766.000.000

Sumber: Sumatera Utara dalam Angka 2016(diolah)

Berdasarkan tabel 1.2 di atas pada tahun 2014 Kabupaten Simalungun memperoleh nilai pajak daerah tertinggi sebesar, Rp 33.132.095.000. Sedangkan nilai pajak daerah yang terendah adalah Kabupaten Nias sebesar Rp 3.443.000.000. Selanjutnya, pada tahun 2015 pajak tertinggi juga terdapat pada Kabupaten Simalungun sebesar Rp 80.716.255.000, sedangkan nilai pajak yang terendah juga di Kabupaten Nias sebesar Rp 4.203.000.000. Dan pada tahun 2016 nilai pajak tertinggi adalah Kabupaten Labuhan Batu sebesar Rp 62.500.000.000, sedangkan yang terendah juga dari Kabupaten Nias

³*Ibid.*, hlm.8.

sebesar Rp 4.547.870.000. Selanjutnya nilai retribusi daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.3
Retribusi Daerah (dalam rupiah)

No	Kabupaten	Retribusi Daerah		
		2014	2015	2016
1	Nias	32.200.375.000	1.868.200.000	2.206.200.000
2	Mandailing Natal	12.852.000.000	15.852.097.000	24.302.097.000
3	Tapanuli Selatan	8.472.453.000	8.274.492.000	8.274.492.000
4	Tapanuli Tengah	5.454.891.000	3.255.926.000	4.028.651.000
5	Tapanuli Utara	20.816.606.000	23.840.418.000	30.520.000.000
6	Toba Samosir	10.704.016.000	6.107.048.000	6.479.213.000
7	Labuhan Batu	37.788.863.000	48.241.585.000	9.241.585.000
8	Asahan	6.495.281.000	7.260.372.000	9.586.407.000
9	Simalungun	15.583.521.000	7.848.034.000	10.076.451.000
10	Dairi	7.495.000.000	34.528.145.000	45.717.493.000

Sumber: Sumatera Utara dalam Angka 2016(diolah)

Berdasarkan tabel 1.3 di atas pada tahun 2014 nilai retribusi tertinggi adalah Kabupaten Labuhan Batu sebesar Rp 37.788.863.000, sedangkan yang terendah di Kabupaten Asahan sebesar Rp 6.495.281.000. Selanjutnya tahun 2015 nilai retribusi tertinggi juga Kabupaten Labuhan Batu sebesar Rp 48.241.585.000, sedangkan nilai retribusi terendah adalah Kabupaten Tapanuli Tengah sebesar Rp 3.255.926.000 dan pada tahun 2016 nilai retribusi tertinggi adalah Kabupaten Dairi sebesar Rp 45.717.493.000, sedangkan terendah adalah di Kabupaten Tapanuli Tengah sebesar Rp 4.028.651.000.

Dari data pendapatan asli daerah, pajak daerah, dan retribusi di atas dapat dilihat bahwa pendapatan asli daerah pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 pada berbagai Kabupaten di beberapa provinsi Sumatera Utara naik, sedangkan pajak daerah mengalami penurunan pada Kabupaten tertentu,

begitu juga dengan nilai retribusi daerah yang mengalami fluaktif pada berbagai Kabupaten.

Hal ini dapat dilihat pada Kabupaten Mandailing Natal nilai pajak daerah yang diperoleh pada tahun 2014 sebesar Rp 20.128.000.000, turun pada tahun 2015 sebesar Rp 19.330.000.000, dan pada tahun 2016 nilai pajak yang diperoleh juga sama dengan tahun sebelumnya, yaitu Rp 19.330.000.000. Selanjutnya di Kabupaten Labuhan Batu nilai pajak daerah yang diperoleh pada tahun 2014 sebesar Rp 29.059.600.000, naik pada tahun 2015 sebesar Rp 62.700.000.000, dan pada tahun 2016 nilai pajak yang diperoleh sama dengan tahun sebelumnya yaitu Rp 62.700.000.000. Selanjutnya di Kabupaten Simalungun nilai pajak yang diperoleh pada tahun 2014 sebesar Rp 33.132.095.000, naik pada tahun 2015 sebesar Rp 80.716.255.000, dan pada tahun 2016 turun sebesar Rp 50.525.000.000.

Sedangkan peningkatan nilai retribusi daerah di berbagai Kabupaten mengalami fluaktif, yaitu di Kabupaten Nias pada tahun 2014 sebesar Rp 32.200.375.000, turun pada tahun 2015 sebesar Rp 1.868.200.000, dan pada tahun 2016 naik sebesar Rp 2.206.200.000. Selanjutnya di Kabupaten Tapanuli Selatan pada tahun 2014 sebesar Rp 8.472.453.000, turun pada tahun 2015 sebesar Rp 8.274.492.000, dan pada tahun 2016 nilai retribusi daerah sama dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp 8.274.492.000. Selanjutnya di Kabupaten Tapanuli Tengah pada tahun 2014 sebesar Rp 5.454.453.000, turun pada tahun 2015 sebesar Rp 3.255.926.000, dan pada tahun 2016 naik sebesar Rp 4.028.651.000.

Selanjutnya di Kabupaten Toba Samosir pada tahun 2014 nilai retribusi daerah sebesar Rp 10.704.016.000, turun pada tahun 2015 sebesar Rp 6.107.048.000, dan pada tahun 2016 naik sebesar Rp 6.479.213.000. Selanjutnya di Kabupaten Labuhan Batu pada tahun 2014 sebesar Rp 37.788.863.000, naik pada tahun 2015 sebesar Rp 48.241.585.000, dan pada tahun 2016 turun drastis sebesar Rp 9.241.585.000. Selanjutnya di Kabupaten Simalungun pada tahun 2014 nilai retribusi daerah sebesar Rp 15.583.521.000, turun pada tahun 2015 sebesar Rp 7.848.034.000, dan pada tahun 2016 naik sebesar Rp 10.076.451.000. Karena pendapatan asli daerah merupakan tulang punggung pembiayaan daerah. Oleh karena itu, kemampuan melaksanakan ekonomi pada daerah otonom di ukur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap total APBD. Semakin besar kontribusi yang dapat diberikan terhadap APBD, maka semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah pusat sehingga otonomi daerah dapat terwujud.⁴

Oleh karena itu, wajar apabila peningkatan pendapatan asli daerah dijadikan salah satu indikator kesiapan daerah dalam menjalankan kebijakan otonomi. Apalagi otonomi telah memberikan keleluasaan dalam kewenangan, penataan organisasi, dan pengelolaan keuangan. Jadi, yang harus diperhatikan ialah pengenaan pajak dan retribusi hendaknya seiring dengan pendapatan masyarakat serta pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Maka berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, peneliti tertarik

⁴*Ibid.*

untuk mengangkat judul “**PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA BEBERAPA KABUPATEN DI PROVINSI SUMATERA UTARA PERIODE 2014-2016**”.

B. Identifikasi Masalah

1. Tahun 2014 nilai pajak daerah di Kabupaten Labuhan Batu meningkat namun pendapatan asli daerah menurun
2. Selama tiga tahun berturut-turut nilai retribusi daerah terendah adalah Kabupaten Nias namun, untuk nilai pendapatan asli daerahnya adalah Kabupaten Toba Samosir
3. Pendapatan asli daerah di berbagai kabupaten tiap tahun meningkat namun nilai retribusi mengalami fluktuatif
4. peningkatan pendapatan asli daerah dilihat dari perspektif yang lebih luas tidak hanya ditinjau dan segi daerah masing-masing tetapi dalam kaitannya dengan kesatuan perekonomian Indonesia.

C. Batasan Masalah

Mengingat begitu banyaknya permasalahan yang harus diatasi, agar penelitian ini dapat dibahas lebih tuntas dan dapat mencapai sasaran yang diharapkan, perlu adanya pembatasan masalah. Berdasarkan identifikasi yang ada, penelitian lebih memfokuskan pada variabel bebas dan variabel terikat. Adapun variabel bebas dalam penelitian ini yaitu pajak daerah dan retribusi daerah, sedangkan variabel terikatnya yaitu pendapatan asli daerah.

D. Definisi Operasional Variabel

Tabel 1.4
Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi Variabel	Indikator	Skala Pengukuran
Pendapatan Asli Daerah (Y)	Pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan perundang-undangan sebagai suatu kemampuan daerah menghimpun sumber-sumber dana untuk membiayai pembangunan daerah.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pajak daerah 2. Retribusi daerah 3. Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan 4. Dana perimbangan 	Rasio
Pajak Daerah (X1)	Iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pajak hotel 2. Pajak restoran 3. Pajak hiburan 4. Pajak reklame 5. Pajak penerangan jalan 6. Pajak pengambilandan Pegolahan 7. Pajak parkir 	Rasio
Retribusi Daerah (X2)	Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa tertentu yang khusus disediakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Retribusi jasa umum 2. Retribusi jasa usaha 3. Retribusi 	Rasio

	oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan	perizinan tertentu	
--	---	--------------------	--

E. Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Apakah terdapat pengaruh antara pajak daerah secara parsial terhadap pendapatan asli daerah pada beberapa kabupaten di provinsi Sumatera Utara periode 2014-2016?
2. Apakah terdapat pengaruh antara retribusi daerah secara parsial terhadap pendapatan asli daerah pada beberapa kabupaten di provinsi Sumatera Utara periode 2014-2016?
3. Apakah terdapat pengaruh antara pajak daerah dan retribusi daerah secara simultan terhadap pendapatan asli daerah pada beberapa kabupaten di provinsi Sumatera Utara periode 2014-2016?

F. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh pajak daerah secara parsial terhadap pendapatan asli daerah pada beberapa kabupaten di provinsi Sumatera Utara periode 2014-2016
2. Untuk mengetahui pengaruh retribusi daerah secara parsial terhadap pendapatan asli daerah pada beberapa kabupaten di provinsi Sumatera Utara periode 2014-2016

3. Untuk mengetahui pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah secara simultan terhadap pendapatan asli daerah pada beberapa kabupaten di provinsi Sumatera Utara periode 2014-2016

G. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini merupakan pelatihan kemampuan yang diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dan pengalaman dan pastinya berguna dimasa yang akan datang.

2. Bagi Lembaga Perguruan Tinggi

Hasil penelitian ini diharapkan menambah perbendaharaan perpustakaan IAIN Padangsidempuan, memberikan informasi bagi peneliti selanjutnya, dan membantu para mahasiswa dalam mengembangkan pengetahuannya.

3. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu pertimbangan dan masukan dalam pengambilan keputusan dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah di kabupaten Sumatera Utara

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai bahan informasi bagi pembaca yang ingin lebih mengetahui tentang pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten Sumatera Utara. Dan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengaplikasikan pendapatan asli daerah dalam penelitian yang sama.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penelitian ini sesuai dengan permasalahan yang ada, maka peneliti menggunakan sistematika pembahasan menjadi lima bab. Hal ini dimaksud untuk penelitian laporan penelitian yang sistematis, jelas dan mudah dipahami. Masing-masing bab terdiri dari beberapa sub sebagai berikut:

Bab Pertama Pendahuluan membahas tentang latar belakang masalah yaitu berisi tentang argumentasi penelitian dengan mendeskripsikan beberapa masalah atau fenomena yang akan diangkat sebagai masalah. Selanjutnya membahas identifikasi masalah, yaitu memuat segala variabel yang saling terkait dengan variabel peneliti yang akan diteliti, khususnya pada variabel dependen. Selanjutnya membahas batasan masalah agar masalah yang akan diteliti lebih fokus dan terarah sehingga masalah penelitian tidak melebar. Selanjutnya rumusan masalah, merupakan unsur dari batasan masalah yang akan diteliti dan akan dicarikan penyelesaiannya lewat penelitian. Definisi operasional variabel, ini membahas istilah yang ada dalam setiap variabel yang dibatasi atau dipertegas makna apa yang dimaksud peneliti agar tidak terjadi simpang siur pemahaman. Selanjutnya tujuan dan kegunaan penelitian, akan memperjelas apa yang menjadi tujuan serta manfaat apa yang didapat bagi orang yang membutuhkan serta pihak pemerintah dari hasil penelitian ini.

Bab Kedua landasan teori dipaparkan mengenai kerangka teori yaitu berisikan tentang teori atau konsep yang dapat mendukung masalah penelitian

agar dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kemudian penelitian terdahulu, memuat hasil penelitian sebelumnya yang memiliki kemiripan dengan masalah atau variabel penelitian yang akan diangkat peneliti untuk menjelaskan bahwa adanya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Selanjutnya hipotesis, merupakan kesimpulan sementara terhadap rumusan masalah penelitian yang akan dibuktikan secara empiris.

Bab Ketiga metode penelitian, membahas lokasi dan waktu penelitian, kemudian jenis penelitian, maksudnya berisi tentang beberapa penjelasan dari jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian. Selanjutnya populasi dan sampel, dimana populasi merupakan keseluruhan dari subjek atau objek yang diamati namun ditarik sampel yang merupakan bagian dari populasi yang berguna memperkecil jumlah populasi yang akan diteliti sehingga peneliti dapat mengontrol dari setiap sampel penelitian. Teknik analisis data, menjelaskan rumus statistik yang akan digunakan menganalisis data yang diperoleh dari tiap-tiap variabel penelitian diantaranya statistik deskriptif, normalitas, estimasi data panel, uji pemilihan model, uji hipotesis, dan uji model regresi berganda.

Bab Keempat hasil penelitian, gambaran objek penelitian, berisikan deskripsi yang dijadikan sebagai objek penelitian. Deskripsi hasil penelitian, mendeskripsikan data yang diperoleh baik dari variabel independen dan dependen. Selanjutnya uji normalitas, digunakan untuk melihat kenormalan dari keseluruhan data yang akan diteliti. Pemilihan model data panel, melakukan beberapa teknik pengujian untuk memilih model yang tepat. Uji

hipotesis, menguji hipotesis atau kesimpulan sementara penelitian. Setelah pembahasan yang mendalam landasan teori dan data yang telah diperoleh. Selanjutnya menguraikan gambaran umum Sumatera Utara, deskripsi data penelitian, analisis data penelitian, uji deskriptif, uji normalitas, uji pemilihan model, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti membuat kesimpulan yang merupakan jawaban atas pokok permasalahan yang peneliti ajukan, keterbatasan penelitian dan juga saran yang akan berguna bagi penyusun, pihak kampus, dan kepada pihak-pihak lain pada umumnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teori

1. Pendapatan Asli Daerah

a. Definisi Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan. ” Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.¹

Pendapatan asli daerah merupakan sumber penerimaan daerah sendiri perlu terus ditingkatkan agar dapat menanggung sebagian beban belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintah dan kegiatan pembangunan yang setiap tahun meningkat sehingga kemandirian otonomi daerah otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan.

¹ Nurlan Darise, *Pengelolaan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan BLU*, (Jakarta Barat: PT indeks, 2009), hlm. 33.

b. Sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri atas:

- 1) Pendapatan asli daerah , merupakan pendapatan daerah yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.²
- 2) Dana perimbangan, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan antara pemerintah daerah. Sesuai dengan pasal 10 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Dana Perimbangan terdiri atas, dana bagi hasil, dana alokasi, dan dana alokasi khusus. Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari APBN yang dibagikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu dengan memperhatikan potensi daerah penghasil. Dana bagi hasil terdiri dari dana bagi hasil pajak bersumber dari pajak dan dana bagi hasil sumber daya alam.³

² Nurlan Darise, *Pengelolaan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan BLU*, (Jakarta Barat: PT indeks, 2009), hlm. 33.

³*Ibid.*, hlm. 33.

- 3) Dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, merupakan sumber pendapatan asli daerah selanjutnya antara lain:⁴
- a) Hibah/bantuan dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan lembaga/organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat.
 - b) Dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam dan krisis solvabilitas.
 - c) Dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota.
 - d) Dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah, dan
 - e) Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya.⁵

2. Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah

a. Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran Pemerintah merupakan salah satu unsur permintaan agregat. Pemerintah tentu saja tidak hanya melakukan pengeluaran, akan tetapi juga memperoleh penerimaan.penerimaan

⁴Nurlan Darise, *Op. Cit.*, hlm. 39.

dan pengeluaran diliput dalam satu konsep terpadu mengenai pendapatan dan belanja negara.⁶

b. Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto merupakan jumlah nilai tambah atau jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu kurun waktu.⁷

c. Jumlah Penduduk

Di negara berkembang perkembangan jumlah penduduk merupakan penghambat pembangunan ekonomi, karena lebih banyak menimbulkan dampak negatif terhadap pembangunan.⁸

3. Pendapatan Asli Daerah Dalam Pandangan Islam

Pada dasarnya distribusi kekayaan menjadi pusat perhatian ekonomi Islam untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Beberapa instrumen keuangan yang digunakan diantaranya zakat, sedekah, infak dan wakaf. Tak terkecuali bagi hasil pajak dan retribusi karena sama bertujuan mensejahterakan ummat. Selain itu, dulu sumber harta negara juga didapatkan dari peperangan yang diakui sebagai harta rampasan perang (*anfal; ghanimah dan fa'i*). Karenanya, harta rampasan perang ini pun tidak lepas dari perhatian untuk siapa saja pembagian distribusinya. Kebijakan distribusi harta ini tidak lain

⁶Dumairi, *Perekonomian Indonesia* (Yogyakarta: Erlangga, 2009), hlm. 157.

⁷Badan Pusat Statistik Kota Solok

⁸Sadono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), hlm. 98-99.

adalah untuk mewujudkan pemerataan pendapatan publik. Khusus distribusi berikut ini akan dijelaskan dalam QS. Al-Hasyr: ayat 7

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ
 وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا
 يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۗ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ
 فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ

Apa saja harta rampasan (fai'i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya.⁹

Cara pembagian kekayaan merupakan wujud keadilan distribusi harta, dengan satu tujuan yaitu supaya harta tersebut tidak hanya beredar diantara orang-orang kaya saja. Kebijakan ini diutamakan untuk kepentingan publik yang lebih yaitu anak-anak yatim, orang miskin dan orang-orang dalam perjalanan di jalan Allah. Jumlah pembagiannya sudah ditentukan sehingga berapa pun besarnya pembagian harta itu mestinya

⁹Departemen Agama, *Al-qur'an dan Terjemahan Al- Jumnatul 'Ali* (Bandung: CV J-Art, 2004), hlm. 150

diterima. Semua kebijakan ini mesti diterapkan sebagai wujud ketaatan pada Allah dan Rasul-Nya.¹⁰

4. Pajak Daerah

a. Definisi Pajak daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan pembangunan daerah.¹¹ Pada prinsipnya sumber pendapatan pemerintah Kabupaten/Kota yang berasal dari pajak daerah dapat dikategorikan menjadi tiga sumber, yaitu penerimaan pajak dari bagi hasil pajak pusat, penerimaan pajak yang merupakan bagi hasil dari pajak provinsi, dan penerimaan pajak Kabupaten/Kota yang berasal dari kewenangan untuk memungutnya dan penerimaan pajak dari bagi hasil pajak pusat.

Pendapatan adalah semua penerimaan pada bendahara umum daerah atau bendahara penerimaan yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu bayar kembali oleh pemerintah daerah. Besaran pendapatan diukur berdasarkan azas bruto, yaitu

¹⁰Dwi Suwikno, *Ayat-Ayat Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), hlm. 93-95.

¹¹ Adrian Sutedi, *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah* (Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2008), hlm. 6.

dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).¹²

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹³

Menurut Rochmat Soemitro:

“ pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan untuk membayar pengeluaran umum.”¹⁴

P. J. A. Andriani mengatakan bahwa:

“pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”¹⁵

b. syarat pemungutan pajak adalah sebagai berikut:¹⁶

¹² Irwan Taufiq, *Akuntansi Pemerintahan Daerah* (Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana UGM, 2010), hlm. 31.

¹³ Anggota IKAPI, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* (Bandung: Fokusmedia, 2012), hlm.4.

¹⁴ Y. Sri Pudyatmoko, *Pengantar Hukum Pajak Edisi Revisi* (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2006), hlm. 2.

¹⁵ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2011), hlm. 24.

¹⁶ Masdiarmo, *Perpajakan* (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2008), hlm. 2.

- 1) Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan), adil dalam Perundang-Undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing.
- 2) Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang (syarat yuridis). Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.
- 3) Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis), Sesuai fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.
- 4) Sistem pemungutan pajak harus sederhana, sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh Undang-Undang perpajakan yang baru.

Dengan diubahnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi daerah menjadi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, diharapkan daerah lebih memiliki kemampuan keuangan untuk melaksanakan otonomi. Daerah diberi kewenangan dalam pengenaan pajak dan retribusi daerah agar dapat mengoptimalkan pendapatan asli daerah. Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang pajak dan retribusi daerah, hendaknya tidak berbenturan dengan pungutan pusat, baik pajak maupun bea dan cukai

karena akan menimbulkan duplikasi pungutan yang pada akhirnya akan mendistorsi kegiatan perekonomian.

c. Jenis pajak provinsi terdiri atas:¹⁷

1) Pajak kendaraan bermotor

Objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor meliputi, kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima *gross tonnage*) sampai dengan GT7 (tujuh *gross tonnage*). Tarif pajak kendaraan bermotor untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah sebesar 1% dan paling tinggi sebesar 2%. Untuk kepemilikan kendaraan kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% dan paling tinggi sebesar 10%. Tarif pajak kendaraan bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, lembaga sosial, keagamaan, dan pemerintah ditetapkan paling rendah 0,5% dan paling tinggi sebesar 1%. Tarif pajak kendaraan bermotor alat-alat berat ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% dan paling tinggi sebesar 0,2%.

2) Bea balik nama kendaraan bermotor

Objek pajak bea balik nama kendaraan bermotor adalah penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor. Tarif pajaknya untuk

¹⁷ Mohammad Zain dan Suryono Hermana, *Himpunan Undang-Undang Perpajakan* (Jakarta: PT Indeks, 2010), hlm. 321.

penyerahan pertama sebesar 20% dan penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1%.

3) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor

Objek pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di air. Tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor ditetapkan paling tinggi sebesar 10%. Khusus untuk tarif pajak bahan bakar kendaraan umum ditetapkan paling sedikit 50%.

4) Pajak air permukaan

Objek pajak air permukaan adalah pengambilan atau pemanfaatan air permukaan. Tarifnya paling tinggi sebesar 10%.

5) Pajak rokok

Objek pajak rokok adalah konsumsi rokok, tarifnya ditetapkan sebesar 10%.

d. Jenis pajak yang dikelola Kabupaten/ Kota:¹⁸

1) Pajak Hotel

¹⁸ Muhammad zain dan Suryo Hermana, *Op. Ci.*, hlm. 321.

Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang seperti fasilitas telepon, faxsimile, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Tarif pajak hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10%.

2) Pajak Restoran

Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran meliputi, pelayanan penjualan makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Tarif pajak restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10%.

3) Pajak Hiburan

Objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran meliputi, tontonan film, pagelaran kesenian, musik, tari, dan busana, kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya, pameran, karaoke, akrobat, golf, pacuan kuda, pusat kebugaran, dan pertandingan olahraga. Tarif pajak hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35%. Khusus hiburan tradisional dikenakan tarif 10% sedangkan untuk hiburan pagelaran busana,

kontes kecantikan, refleksi, karaoke ditetapkan paling tinggi sebesar 75%.

4) Pajak Reklame

Objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame meliputi, reklame papan/billboard/vidiotron/megatron, reklame kain, reklame melekat, stiker, reklame selebaran, reklame berjalan termasuk pada kendaraan, reklame udara, reklame apung, reklame suara, reklame film/*slide*, dan reklame peragaan. Tarif pajak reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25%.

5) Pajak Penerangan Jalan

Objek pajak penerangan jalan adalah pengguna tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain meliputi, penggunaan tenaga listrik oleh instansi pemerintah dan pemerintah daerah, penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing, penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kepastian tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait. Tarif penerangan jalan yang ditetapkan paling tinggi sebesar 10%.

6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Objek pajak mineral bukan logam dan batuan adalah kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan meliputi, asbestos, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, kaolin, nitrat, dan lain-lain. Tarif pajak mineral bukan logam dan batuan ditetapkan paling tinggi sebesar 25%.

7) Pajak Parkir

Objek pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha meliputi, penyelenggaraan tempat parkir oleh pemerintah pusat dan daerah, penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri, dan lain-lain. Tarif pajak parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30%.

8) Pajak Air Tanah

Objek pajak air tanah adalah pengambilan atau pemanfaatan air tanah. Tarif pajak air tanah ditetapkan paling tinggi sebesar 20%.

9) Pajak Sarang Burung Walet

Objek pajak sarang burung walet adalah pengambilan atau pengusahaan sarang burung walet. Tarif pajak sarang burung walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10%.

10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Objek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah bumi atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3%.

Jadi, agar dapat diakui sebagai pendapatan maka pendapatan dari pajak dalam bentuk bagi hasil maupun pajak hasil pemungutan langsung harus memenuhi definisi sebagai pendapatan. Peraturan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan mendefinisikan pendapatan adalah semua penerimaan rekening kas umum negara/ daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Rekening kas umum negara/daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur/bupati/walikota untuk menampung seluruh pengeluaran daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan ekuitas dana lancar adalah selisih antara asset lancar dengan kewajiban jangka pendek.¹⁹

Dengan demikian bagi pemerintah Kabupaten/Kota, semua penerimaan dalam bentuk pajak dan dalam bentuk bagi hasil pajak

¹⁹ Abdul Halim dan Syam Kusufi, *Op. Cit.*, hlm. 401.

dari pemerintah provinsi merupakan penerimaan yang menambah ekuitas dana lancar dalam satu periode yang masuk ke dalam rekening kas umum daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah Kabupaten/Kota. Pendapatan diakui sebagai sumber penerimaan daerah berdasarkan dua dasar pengakuan yaitu dasar kas dan dasar akrual.

Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.²⁰

5. Pajak Dalam Pandangan Islam

Secara etimologi pajak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *dharibah*, yang artinya mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebankan, dan lain-lain. *Dharibah* adalah bentuk kata kerja (*fi,il*), sedangkan bentuk kata bendanya (*ism*) adalah *dharibah*, yang dapat berarti beban. *Dharibah* disebut beban, karena merupakan kewajiban tambahan atas harta setelah zakat, sehingga dalam pelaksanaannya akan dirasakan sebagai sebuah beban (pikulan yang berat). Dalam contoh pemakaian, jawatan perpajakan disebut dengan *masalahah adh-dharaib*.

²⁰ Anggota IKAPI, *Standar Akuntansi Pemerintahan* (Bandung: Fokusmedia, 2012), hlm. 43.

Secara bahasa maupun tradisi, *dharibah* dalam penggunaannya memang banyak arti, namun para ulama dominan memakai ungkapan *dharibah* untuk menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban. Hal ini tampak jelas dalam ungkapan bahwa *jizyah* atau *kharaj* dipungut secara *dharibah*, yakni secara wajib. Bahkan sebagian ulama menyebut *kharaj* merupakan *dharibah*. Jadi, *dharibah* adalah harta yang dipungut secara wajib oleh negara untuk selain *jizyah* dan *kharaj*. *Jizyah* merupakan pungutan yang dikenakan pada kalangan non muslim sebagai imbalan untuk jaminan yang diberikan oleh penguasa Islam kepada mereka.. sedangkan *kharaj* merupakan sejenis pajak yang dikenakan pada tanah yang terutama ditaklukan oleh kekuatan senjata, terlepas apakah si pemilik seorang yang di bawah umur, dewasa, merdeka, budak maupun merdeka. Sekalipun keduanya biasa dikategorikan *dharibah*. Definisi tentang pajak menurut beberapa ulama:

Yusuf Qhardawi berpendapat:

“Pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasi sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik, dan tujuan-tujuan yang lain yang ingin dicapai oleh negara”.

Gazy Inayah berpendapat:

“Pajak adalah kewajiban untuk membayar tunai yang ditentukan oleh pemerintah atau pejabat berwenang yang bersifat mengikat tanpa adanya imbalan tertentu. Ketentuan pemerintah ini sesuai dengan kemampuan si pemilik harta dan dialokasikan untuk mencukupi

kebutuhan pangan secara umum dan untuk memenuhi tuntutan politik keuangan bagi pemerintah”.²¹

Ada beberapa ketentuan pajak (*dharibah*) menurut syariat, yang sekaligus membedakannya dengan pajak dalam sistim kapitalis (non- Islam), yaitu:²²

- a. Pajak (*dharibah*) bersifat kontemporer, tidak bersifat kontinu, hanya boleh dipungut ketika di Baitul Mal tidak ada harta atau kurang. Ketika Baitul Mal sudah terisi kembali, maka kewajiban pajak bisa dihapuskan. Berbeda dengan zakat, yang tetap dipungut.
- b. Pajak (*dharibah*) hanya boleh dipungut untuk pembiayaan yang merupakan kewajiban kaum Muslim dan sebatas jumlah yang diperlukan untuk pembiayaan wajib tersebut, tidak boleh lebih, sedangkan pajak menurut non-Muslim ditujukan untuk seluruh warga tanpa membedakan agama.
- c. Pajak (*dharibah*) hanya dipungut dari kaum Muslim dan tidak dipungut dari non-Muslim. Sebab, *dharibah* dipungut untuk membiayai keperluan yang menjadi kewajiban bagi kaum Muslim, yang tidak menjadi kewajiban non-Muslim.
- d. Pajak (*dharibah*) hanya dipungut dari kaum Muslim yang kaya, tidak dipungut selain darinya.

²¹ Gusfahmi, *Op. Cit.*, hlm 27-28.

²² *Ibid.*, hlm. 32.

- e. Pajak (*dharibah*) hanya dipungut sesuai dengan jumlah pembiayaan yang diperlukan, tidak boleh lebih. Jika sudah cukup maka pemungutannya dihentikan.
- f. Pajak (*dharibah*) dapat dihapus, bila sudah tidak diperlukan. Hal ini sudah dipraktikkan oleh Rasulullah SAW dan para khalifah sesudah beliau.

6. Retribusi Daerah

a. Definisi Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau perizinan tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi diarahkan pada pelayanan pemerintah yang bersifat final (*final good*), bukan pada pelayanan yang sifatnya *intermediary service*, harus diperhatikan bahwa tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi. Bentuk lain dari *public revenue financing* adalah retribusi. Secara teoritis mempunyai dua fungsi yaitu, sebagai alat ukur untuk mengatur (mengendalikan) pemanfaatan prasarana dan jasa yang tersedia, dan merupakan pembayaran atas penggunaan prasarana dan jasa.²³

Menurut Rochmat Sumitro:

“Retribusi daerah adalah pembayaran kepada kas negara yang dilakukan kepada mereka yang menggunakan jasa-jasa negara, artinya retribusi daerah sebagai pembayaran atas jasa atau karena mendapat pekerjaan usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan, atau jasa

²³ Adrian Sutedi, *Op. Cit.*, hlm. 7.

yang diberikan oleh daerah baik secara langsung maupun tidak langsung.”²⁴

b. Jenis- jenis retribusi daerah:²⁵

- 1) Retribusi jasa umum, objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Adapun jenis- jenisnya adalah sebagai berikut:
 - a) Retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, balai pengobatan, dan rumah sakit umum daerah.
 - b) Retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan meliputi pengambilan, pengangkutan, dan pembuangan serta penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan sampah rumah tangga, industri, dan perdagangan, tidak termasuk pelayanan kebersihan jalan umum dan taman.
 - c) Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil meliputi akte kelahiran, akte perkawinan, akte perceraian, akte pengesahan dan pengakuan anak, akte ganti nama bagi warga negara asing , dan akte kematian.
 - d) Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, meliputi pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurugan, pembakaran/pengabuan mayat, dan sewa tempat

²⁴ *Ibid.*, hlm. 74.

²⁵ Nurlan Darise, *Op. Cit.*, hlm. 67-68.

- pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola pemerintah daerah.
- e) Retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir ditepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah.
 - f) Retribusi pelayanan pasar adalah fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa pelataran, los yang dikelola pemerintah daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan pihak swasta.
 - g) Retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
 - h) Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan/pengujian oleh pemerintah daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran yang dimiliki atau dipergunakan oleh masyarakat.
 - i) Retribusi penggantian biaya cetak peta adalah peta yang dibuat oleh pemerintah daerah, seperti peta dasar (garis), peta foto, peta digital, peta tematik, dan peta teknis (struktur).
 - j) Retribusi pengujian kapal perikanan adalah pengujian terhadap kapal penangkap ikan yang menjadi kewenangan daerah.

- 2) Retribusi jasa usaha, objek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial. Adapun jenis-jenisnya adalah sebagai berikut:²⁶
- a) Retribusi pemakaian kekayaan daerah, antara lain, pemakain tanah dan bangunan, pemakaian ruangan untuk pesta, pemakaian kendaraan/alat-alat besar milik daerah.
 - b) Retribusi pasar grosir dan/ atau pertokoan adalah pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang disediakan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pihak swasta.
 - c) Retribusi tempat pelelangan adalah tempat yang secara khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk melakukan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
 - d) Retribusi terminal adalah pelayanan persediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang dimiliki atau dikelola pemerintah daerah.
 - e) Retribusi tempat khusus parkir adalah pelayanan tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki atau dikelola oleh pemerintah daerah,

²⁶ *Ibid.*, hlm. 69.

- tidak termasuk yang disediakan dan dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pihak swasta.
- f) Retribusi tempat penginapan/ pesanggrahan/ villa milik daerah adalah pelayanan penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang dimiliki dan dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pihak swasta.
- g) Retribusi penyedotan kakus adalah pelayanan penyedotan kakus/jamban yang dilakukan oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pihak swasta.
- h) Retribusi rumah potong hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang dimiliki atau dikelola oleh pemerintah daerah.
- i) Retribusi pelabuhan kapal adalah pelayanan pada pelabuhan kapal perikanan atau bukan kapal perikanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan kapal yang dimiliki atau dikelola oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pihak swasta.
- j) Retribusi tempat rekreasi dan olah raga adalah tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang dimiliki atau dikelola oleh pemerintah daerah

- k) Pelayanan penyeberangan di atas air adalah pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di atas air yang dimiliki atau yang dikelola oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pihak swasta.
- l) Retribusi pengolahan limbah cair adalah pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, industri yang dikelola atau dimiliki oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pihak swasta.
- m)Retribusi penjualan produksi usaha daerah adalah penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah, antara lain, bibit/benih tanaman, bibit ternak, dan bibit benih ikan, tidak termasuk penjualan produksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pihak swasta.
- 3) Retribusi perizinan tertentu, adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Adapun jenis-jenis retribusi perizinan tertentu adalah sebagai berikut.²⁷
- a) Retribusi izin mendirikan bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.

²⁷ *Ibid.*

- b) Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol disuatu tempat tertentu.
- c) Retribusi izin gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian , dan gangguan.
- d) Retribusi izin trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada satu atau beberapa trayek tertentu.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini sudah pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Oleh karena itu peneliti tertarik mengangkat judul ini kembali untuk mengetahui pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah pada beberapa kabupaten di provinsi Sumatera Utara tahun 2014-2016.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Arief Eka Atmaja (2011), Jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro Semarang, Skripsi	Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah di kota Semarang	Dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama variabel pengeluaran daerah, jumlah penduduk, dan produk domestik regional bruto dapat mempengaruhi pendapatan asli daerah. Variabel pengeluaran daerah, jumlah penduduk dan produk domestik regional bruto, yang memiliki

			pengaruh besar pendapatan asli daerah di kota semarang adalah jumlah penduduk. Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien regresi tertinggi yaitu 5.742. ²⁸
2.	Adi Nugroho, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Dian Nuswantoro Semarang (2014), Skripsi	Analisis Pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah periode 2010-2012	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan pajak daerah berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan asli daerah dan penambahan retribusi daerah berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan asli daerah dan secara simultan pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan asli daerah. ²⁹
3.	Regina (2015), Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Bandung, Skripsi	Pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah di kota Bandung (periode 2011-2015)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah sebesar 96,6%. Secara parsial pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah, sementara retribusi daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah. ³⁰

²⁸ Arif Eka Atmaja, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Di Kota Semarang" (Skripsi, Universitas Diponegoro Semarang, 2011), hlm. 42-52.

²⁹ Adi Nugroho, "Analisis Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Periode 2010-2012" (Skripsi, Universitas Dian Nuswantoro Semarang, 2014), hlm. 64-70.

³⁰ Regina, "Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Bandung Periode 2011-2015", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Bandung, 2015), hlm. 54-72.

4.	Melida Alisa Putri Dan Sri Rahayu (2015), Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom, Jurnal	Pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (studi kasus pada pemerintah daerah kabupaten Cirebon tahun anggaran 2010-2014)	Hasil penelitian ini menunjukkan secara simultan terdapat pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah sebesar 80,3% dan secara parsial pajak daerah berpengaruh signifikan secara positif terhadap pendapatan asli daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan secara positif terhadap pendapatan asli daerah. ³¹
5.	Andrian Haryanto (2016), program studi akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas PGRI Yogyakarta, Skripsi	Pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (studi kasus daerah istimewa Yogyakarta)	Hasil penelitian ini menunjukkan variabel independen yang terdiri dari pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Pengujian kedua variabel-variabel tersebut adalah variabel pajak dengan nilai t- hitung sebesar 16,614 dan probabilitas signifikan sebesar 0,000 dan variabel retribusi dengan nilai t-hitung sebesar 2,274 dan probabilitas signifikan sebesar 0,031. ³²
6	Sandry Yossi Mamonto, J.B Kalangi dan Krest D. tolosang, (2015) Fakultas Ekonomi dan	Pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap belanja modal (studi pada kabupaten Bolang Mongondow	Hasil penelitian menunjukkan variabel pajak daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal dan variabel retribusi daerah juga tidak berpengaruh terhadap

³¹Melida Alissa Putri Dan Sri Rahayu, "Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2010-2014)" (Jurnal, Universitas Telkom Cirebon, 2015), hlm. 45-52.

³²Adrian Haryanto, "Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Daerah Istimewa Yogyakarta)" (Skripsi, Universitas PGRI Yogyakarta, 2016), hlm. 56-62.

	Bisnis, Universitas Sam Ratulangi Manado, Jurnal	periode 2004- 2013.	belanja modal. Kemudian secara simultan pajak daerah dan retribusi daerah juga tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Dimana variabel pajak daerah dan retribusi daerah hanya mempunyai kontribusi sebesar 7% terhadap belanja modal, sedangkan 93% disumbangkan oleh variabel lain yang tidak diamati dalam penelitian ini. ³³
--	---	------------------------	---

Dari penelitian terdahulu di atas, terdapat persamaan serta perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini, yaitu:

- 1) Persamaan dari penelitian ini dengan Arief Eka Atmaja adalah terletak pada variabel Y yang digunakan, dan perbedaannya adalah peneliti Arief Eka Atmaja memfokuskan pada faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pendapatan asli daerah di kota Semarang sedangkan peneliti memfokuskan pada pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah.
- 2) Persamaan penelitian Adi Nugroho dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan uji asumsi klasik, uji koefisien determinan, uji parsial dengan t-test, uji simultan dengan F test. Perbedaannya adalah cara pengambilan sampel yang digunakan, peneliti menggunakan *purposive sampling* sedangkan Adi Nugroho menggunakan *sensus sampling* (sampel jenuh).

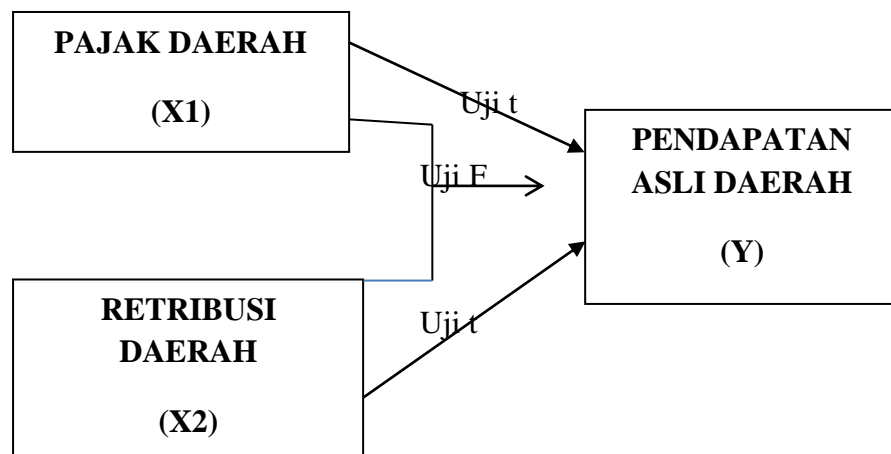
³³Sandry Yossi Mamonto, J. B Kalangi Dan Krest D. Tolosang, “ Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Modal (Studi Pada Kabupaten Bolang Mongondow Periode 2004-2013)” (Jurnal, Universitas Sam Ratulangi Manado, 2015), hlm. 72-83.

- 3) Persamaan penelitian Regina dengan penelitian ini adalah juga menggunakan uji asumsi klasik, uji normalitas, pengujian hipotesis secara parsial dan secara simultan. Perbedaannya adalah penelitian Regina menggunakan data *time series* sedangkan peneliti menggunakan data panel.
- 4) Persamaan penelitian dengan Melida Alisa Putri dan Sri Rahayu adalah juga uji yang digunakan sama berupa uji asumsi klasik dan variabel yang digunakan juga sama yaitu pajak daerah dan retribusi daerah. Perbedaannya adalah menggunakan data *time series* sedangkan penelitian ini menggunakan data panel.
- 5) Persamaan penelitian dengan Andrian Haryanto adalah juga menggunakan variabel pajak daerah dan retribusi daerah sebagai variabel independen dan pendapatan asli daerah sebagai variabel dependen, sedangkan perbedaannya adalah penelitian Andrian Haryanto melihat bagaimana pengaruh penerimaan pajak terhadap pendapatan asli daerah.
- 6) Persamaan penelitian dengan Sandri Yossy Mamonto, J.B Kalangi dan Kres D. Tolosang adalah juga menggunakan variabel independen yang sama, sedangkan perbedaannya adalah terdapat pada variabel dependen yang digunakan.

C. Kerangka Pikir

Kerangka pemikiran merupakan sintesa dari serangkaian yang tertuang dalam tinjauan pustaka, yang pada dasarnya merupakan gambaran sistematis dari kinerja teori dalam memberikan solusi atau alternatif dan serangkaian masalah yang ditetapkan. Berdasarkan landasan teori yang telah dipaparkan diatas, bahwa pajak daerah dan retribusi daerah mempunyai hubungan yang saling berkaitan.

Gambar 2.1
Kerangka Pikir



Pembayaran pajak oleh rumah tangga dan perusahaan kepada pemerintah menimbulkan pendapatan kepada pihak pemerintah. Ini merupakan sumber pendapatan pemerintah yang terutama. Selanjutnya pungutan yang dilakukan pemerintah tersebut untuk menunjang pemerataan pembangunan dikota maupun daerah guna melancarkan kegiatan perekonomian dikalangan pelaku ekonomi dan sebagai upaya

untuk mensejahterakan masyarakat dengan membangun sejumlah bangunan-bangunan penting.

D. Hipotesis

Hipotesis adalah suatu kesimpulan yang masih kurang atau kesimpulan yang masih belum sempurna.³⁴ Hipotesis merupakan alat yang mempunyai kekuatan dalam proses inkuiri. Oleh karena itu, hipotesis dapat menghubungkan dari teori yang relevan dengan kenyataan yang ada atau fakta, atau dari kenyataan dengan teori yang relevan.³⁵ Hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₀₁: Tidak terdapat pengaruh antara pajak daerah secara parsial terhadap pendapatan asli daerah pada beberapa kabupaten di provinsi Sumatera Utara

H_{a1}: Terdapat pengaruh antara pajak daerah secara parsial terhadap pendapatan asli daerah pada beberapa kabupaten di provinsi Sumatera Utara

H₀₂: Tidak terdapat pengaruh antara retribusi daerah secara parsial terhadap pendapatan asli daerah pada beberapa kabupaten di provinsi Sumatera Utara

H_{a2}: Terdapat pengaruh antara retribusi daerah secara parsial terhadap pendapatan asli daerah pada beberapa kabupaten di provinsi Sumatera Utara

³⁴ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 75.

³⁵ Sukardi, *Metodologi Pendidikan* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003), hlm. 41.

H_{03} : Tidak terdapat pengaruh antara pajak daerah dan retribusi daerah secara simultan terhadap pendapatan asli daerah pada beberapa kabupaten di provinsi Sumatera Utara

H_{a3} : Terdapat pengaruh antara pajak daerah dan retribusi daerah secara simultan terhadap pendapatan asli daerah pada beberapa kabupaten di provinsi Sumatera Utara

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada beberapa kabupaten di provinsi Sumatera Utara melalui Badan Pusat Statistik Sumatera Utara. Waktu pelaksanaan penelitian ini mulai bulan Desember 2017 sampai dengan April 2018. Adapun alasan peneliti memilih kabupaten-kabupaten di provinsi Sumatera Utara sebagai lokasi penelitian adalah karena masing-masing daerah memiliki potensi yang beraneka ragam, dengan sumber daya yang cukup luas dan subur untuk dikembangkan, sehingga apabila potensi yang dimiliki tersebut dapat dimanfaatkan dan digunakan seefektif dan efisien mungkin akan menambah pendapatan asli daerah dalam berbagai sektor .

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih detail mengenai suatu gejala atau fenomena. Penelitian ini juga dikatakan kelanjutan dari penelitian eksploratif, karena pada penelitian telah menyediakan gagasan dasar sehingga penelitian ini mengungkapkan secara lebih detail.¹

¹Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: PT Rajagrafindo, 2005), hlm. 42.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah yang berkaitan dengan sekelompok orang, kejadian, atau semua yang mempunyai karakteristik tertentu dan anggota populasi itu disebut dengan elemen populasi (*populasi elemen*).² Menurut Nur Asnawi dan Masyhuri Populasi (*population*) adalah serumpun atau sekelompok objek yang menjadi masalah sasaran penelitian.³

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa populasi adalah seluruh kumpulan dari elemen- elemen yang akan dibuat kesimpulan. Populasi bukan hanya orang, tetapi juga objek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek/subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek itu, yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seruruh kabupaten di Sumatera Utara periode 2014-2016.

2. Sampel

Sampel adalah suatu prosedur pengambilan data dimana hanya sebagian populasi saja yang diambil dan dipergunakan untuk menentukan sifat serta ciri yang dikehendaki dari suatu populasi.⁴

²Rusady Ruslan, *Metode Penelitian Publik Relations dan Komunikasi* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2004), hlm. 133.

³Nur Asnawi dan Masyhuri, *Metodologi Riset Manajemen Pemasaran* (Malang: UIN Maliki Press, 2011), hlm. 117.

⁴Syofian Siregar, *Metode Penelitian Kuantitatif Dilengkapi Dengan Perhitungan Manual & SPSS* (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 30.

Menurut Suharsimi Arikunto:

Sampel adalah proses pemilihan sejumlah elemen secukupnya dari populasi, sehingga penelitian terhadap sampel dan pemahaman tentang sifat atau karakteristiknya akan membuat kita dapat menggeneralisasikan sifat atau karakteristik tersebut pada elemen populasi.⁵

Jadi, sampel adalah sebagian dari populasi yang memiliki sifat atau karakteristik yang digunakan dalam penelitian. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* yaitu digunakan apabila mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu didalam pengambilan sampelnya. *Purposive sampling* merupakan pemilihan sekelompok subjek didasarkan atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya.⁶

Tujuan *purposive sampling* untuk mendapatkan sampel yang representatif sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Dalam metode ini setiap elemen populasi tidak mempunyai kesempatan yang sama untuk memenuhi syarat atau kriteria tertentu dari penelitian, tetapi hanya elemen populasi yang memenuhi syarat atau kriteria tertentu dari penelitian saja yang bisa digunakan sebagai sampel dalam penelitian.

Sampel dalam penelitian ini adalah sepuluh Kabupaten di provinsi Sumatera Utara yaitu Nias, Mandailing Natal, Tapanuli Selatan,

⁵ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 173.

⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), hlm. 91.

Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Toba Samosir, Labuhan Batu, Batu Bara, Simalungun, dan Dairi. Sepuluh kabupaten tersebut akan dilihat melalui data dari tahun 2014-2016 sehingga jumlah sampel sebanyak 30 sampel.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel. Data panel merupakan kombinasi antara data *time series* (runtut waktu) dan *cross section* (silang tempat).⁷ Data *time series* dilakukan berdasarkan kesesuaian waktu, sedangkan data *cross section* diambil dari data satu atau lebih variabel dalam satu kurun waktu.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dan digali melalui hasil pengolahan pihak kedua dari hasil penelitian lapangannya, baik berupa data kualitatif maupun data kuantitatif. Jenis data ini sering disebut data eksternal.⁸ Adapun pengumpulan data penelitian ini diperoleh dari *website* atau situs resmi yang dipublikasikan mengenai laporan keuangan yang terkait.

E. Teknik Pengumpula Data

pengumpulan data adalah suatu langkah dalam metode ilmiah melalui prosedur sistematis, logis, dan proses pencarian data yang valid, baik

⁷ Mudrajad Kuncoro, *Op. Cit.*, hlm. 148.

⁸ Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2005), hlm. 121.

diperoleh secara langsung (*primer*) atau tidak langsung (*secondar*) untuk keperluan analisis dan pelaksanaan pembahasan (*process*) suatu riset secara benar untuk menemukan kesimpulan, memperoleh jawaban (*output*) dan sebagai upaya untuk memecahkan suatu persoalan yang dihadapi peneliti.⁹ Ada beberapa teknik yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

1. Studi Pustaka

Tahap pertama dilakukan melalui studi pustaka yakni jurnal-jurnal dan buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam studi pustaka peneliti berusaha untuk memperoleh gambaran yang lebih bagus, komprehensif mengenai Peraturan Perundang-Undangan dan peraturan pelaksanaannya.

2. Studi Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat dan sebagainya. Dalam melakukan studi dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, dokumen, peraturan-peraturan, dan sebagainya.¹⁰

F. Teknik Analisis Data

Menurut Patton analisa data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian

⁹ Rosady Ruslan, *Op. Cit.*, hlm. 26.

¹⁰ Nur Asnawi dan Mashuri, *Op. Cit.*, hlm. 163.

dasar.¹¹ Untuk mendapatkan hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian maka perlu dilakukan analisis data. Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data panel 10 kabupaten di Sumatera Utara dalam kurun waktu 3 tahun (2014-2016).

1. Uji Analisis Deskriptif

Uji analisis deskriptif bertujuan untuk menguji hipotesis dari penelitian yang bersifat deskriptif dari hasil penelitian¹². Digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Termasuk dalam statistik deskriptif antara lain adalah penyajian data melalui tabel, grafik, diagram lingkaran, piktogram, perhitungan modus, median, mean (pengukuran tendensi sentral), perhitungan desil, persentil, perhitungan penyebaran data melalui perhitungan rata-rata dan standar deviasi, perhitungan presentase. Dalam statistik deskriptif juga dapat dilakukan mencari kuatnya hubungan antara variabel melalui analisis korelasi, melakukan prediksi, dengan analisis regresi, dan membuat perbandingan dengan membandingkan rata-rata data sampel dan populasi.¹³

¹¹ Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008), hlm. 29.

¹² Syofian Siregar, *Op. Cit.*, hlm. 127.

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 147-148.

2. Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan suatu jenis uji statistik yang bertujuan untuk menentukan apakah suatu populasi berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik harus memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Untuk melihat normalitas suatu variabel secara kuantitatif dapat dideteksi dengan cara uji *Jangue- Bera* (J-B).

- a. Jika nilai JB lebih besar dari signifikansi 0,05% berarti berdistribusi normal
- b. Jika kurang dari 0,05% berarti data tersebut tidak normal

3. Uji Pemilihan Model

Ada beberapa metode yang digunakan untuk menguji data panel adalah sebagai berikut:

- a. *Ordinary Least Square* (OLS)

Metode estimasi dengan model OLS tidak ada bedanya dengan membuat regresi dengan data *cross section* dan data *time series*. Sebelum membuat regresi yang harus dilakukan yaitu menggabungkan data *cross section* dengan data *time series* (*pool data*). Kemudian data gabungan ini diperlakukan sebagai suatu kesatuan pengamatan yang digunakan untuk mengistemasi model dengan OLS.¹⁴

¹⁴Nachrowi Djalal Nachrowi dan Hardius Usman, *Pendekatan Populer dan Praktis Ekonometrika untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan* (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2006), hlm. 311.

b. *Fixed Effect*

Teknik yang paling sederhana mengansumsikan bahwa data gabungan yang ada, menunjukkan kondisi yang sesungguhnya. Dalam metode *fixed effect* adalah dengan menggunakan variabel *dummy* untuk membedakan satu objek dengan objek lainnya.¹⁵ Variabel-variabel yang tidak semuanya masuk dalam persamaan model memungkinkan adanya intersep yang tidak konstan atau intersep ini mungkin berubah untuk setiap individu dan waktu.

c. *Random Effect*

Teknik yang digunakan dalam *random effect* mengansumsikan bahwa setiap perusahaan mempunyai perbedaan intersep, yang mana intersep tersebut adalah variabel random atau stokastik. Model ini sangat berguna jika individu (entitas) yang diambil sebagai sampel adalah dipilih secara random dan merupakan wakil populasi. Teknik ini juga memperhitungkan bahwa error mungkin berkorelasi sepanjang *cross section* dan *time series*.¹⁶

4. Uji Asumsi Klasik

Model regresi linear berganda dapat disebut sebagai model yang baik jika model tersebut memenuhi asumsi normalitas data dan terbebas dari berbagai asumsi klasik seperti multikolinearitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas. Uji asumsi klasik secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

¹⁵Wing Wahyu Winarno, *Analisis Ekonometrika dan Statistik Dengan Eviews* (Yogyakarta: Upt STIM YKPN, 2009), hlm.16.

¹⁶*Ibid.*, hlm. 17.

a. Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas adalah kondisi adanya hubungan linear antara variabel independen. Karena melibatkan beberapa variabel independen, maka multikolinearitas tidak akan terjadi pada persamaan regresi sederhana (yang terdiri atas satu variabel dependen dan satu variabel independen).¹⁷ Untuk menguji masalah multikolinearitas dapat melihat matriks korelasi dari variabel bebas, jika terjadi koefisien korelasi lebih dari 0.80 maka terdapat multikolinearitas.¹⁸

b. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas adalah untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Untuk membuktikan dugaan pada uji heteroskedastisitas pertama dilakukan uji White Heteroskedastisitas. Jika nilai F dan $\text{Obs} \cdot R\text{-Square}$ lebih besar dari X^2 tabel, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.¹⁹

c. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi adalah Uji autokorelasi merupakan korelasi antara anggota observasi yang disusun menurut waktu dan tempat. Dari serangkaian pengamatan yang tersusun dalam serangkaian waktu (*time series*) dan data silang (*cross section*). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi autokorelasi. Metode pengujian

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 1.

¹⁸ Sohocrul Aziza, dkk., *Eviews* (Jakarta: Salemba Empat, 2011), hlm. 35.

¹⁹ Wing Wahyu Winarno, *Op.Cit.*, hlm. 58.

autokorelasi menggunakan uji Durbin-Watson (uji DW) dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Jika angka D-W di bawah -2, berarti autokorelasi positif
2. Jika angka D-W di atas +2, berarti autokorelasi negative
3. Jika angka D-W di antara -2 sampai +2, berarti tidak ada autokorelasi.²⁰

5. Analisis Hipotesis

1) Uji Koefisien Regresi Secara Parsial dengan t-test

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel bebas secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Uji ini membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} yaitu apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ berarti bahwa variabel bebas mampu mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat. Sebaliknya jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka variabel bebas tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat, maka dalam hal ini tingkat kepercayaan α sebesar 0.05% (5%). Untuk mengetahui hasil signifikannya atau tidak, angka t_{hitung} akan dibandingkan dengan tabel. Setelah diperoleh t_{hitung} maka interpretasikan hasilnya berlaku ketentuan sebagai berikut:²¹

- a. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak, artinya tidak ada pengaruh yang signifikan dari variabel bebas terhadap variabel terikat.

²⁰Nur Asnawi dan Masuhuri, *Op. Cit.*, hlm. 178.

²¹Muhammad Firdaus, *Ekonometrika Suatu Pendekatan Aplikatif* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), hlm. 88.

- b. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya ada pengaruh yang signifikan dari variabel bebas terhadap variabel terikat.

Sedangkan kesimpulan uji parsial atas penerimaan hipotesis berdasarkan nilai probabilitas adalah sebagai berikut:

- a. Jika $probability > level\ of\ signifikan\ (5\%)$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak.
- b. Jika $probability < level\ of\ signifikan\ (5\%)$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

2) Uji Koefisien Regresi Secara Simultan dengan F- test

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Atau untuk mengetahui apakah model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel terikat atau tidak. Signifikan berarti hubungan yang terjadi dapat berlaku untuk populasi yang dapat digeneralisasi. Setelah diperoleh t_{hitung} maka untuk interpretasikan hasilnya berlaku ketentuan sebagai berikut:²²

- a. Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak
- b. Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima

Sedangkan kesimpulan uji simultan atas penerimaan hipotesis berdasarkan nilai probabilitas adalah sebagai berikut:

²² *Ibid.*, hlm. 89.

- a. Jika probability $>$ level of signifikansi (0,05), maka H_0 diterima dan H_a ditolak
 - b. Jika probability $<$ level of signifikansi (0,05), maka H_0 ditolak dan H_a diterima
- 3) Uji model dengan koefisien determinan (R^2)

Koefisien determinan (R) pada dasarnya adalah untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variansi variabel-variabel yang terikat. ²³ nilai koefisien determinasi adalah diantara 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai koefisien determinasi yang kecil berarti memiliki kemampuan variabel-variabel independen menjelaskan variabel-variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati 1 (satu) berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

4) Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan peneliti, apabila bermaksud meramalkan bagaimana keadaan naik turunnya variabel terikat. Analisis regresi linear berganda dilakukan bila jumlah variabel bebasnya minimal dua variabel. Uji analisis regresi linear berganda dua atau lebih variabel bebas digunakan untuk meramalkan suatu variabel terikat Y

²³Mudrajad Kuncoro, *Op. Cit.*, hlm. 240.

berdasarkan dua atau lebih variabel bebas (X_1 , dan X_2) dalam suatu persamaan linear.

Adapun bentuk persamaan regresi linear berganda dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 PD + \beta_2 RD + e$$

Keterangan:

Y = Variabel pendapatan asli daerah

A = Kostantan

$\beta_1\beta_2$ = Parameter

PD = Variabel pajak daerah

RD = Variabel retribusi daerah

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah provinsi Sumatera Utara

Pada zaman pemerintahan Belanda, Sumatera Utara merupakan suatu pemerintahan yang bernama *Gouvernement van Sumatra* dengan wilayah meliputi seluruh pulau Sumatera, dipimpin oleh seorang Gubernur yang berkedudukan di kota Medan. Setelah kemerdekaan, dalam sidang pertama Komite Nasional Daerah (KND), Provinsi Sumatera kemudian dibagi menjadi tiga sub provinsi yaitu: Sumatera Utara, Sumatera Tengah, dan Sumatera Selatan. Provinsi Sumatera Utara sendiri merupakan penggabungan dari tiga daerah administratif yang disebut keresidenan yaitu: Keresidenan Aceh, Keresidenan Sumatera Timur, dan Keresidenan Tapanuli.¹

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia (R.I) No. 10 Tahun 1948 pada tanggal 15 April 1948, ditetapkan bahwa Sumatera dibagi menjadi tiga provinsi yang masing-masing berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri yaitu: Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Tengah, dan Provinsi Sumatera Selatan. Tanggal 15 April 1948 selanjutnya ditetapkan sebagai hari jadi Provinsi Sumatera Utara. Pada awal tahun 1949, dilakukan kembali reorganisasi pemerintahan di Sumatera. Dengan Keputusan Pemerintah

¹Badan Pusat Statistik, *Sumatera Utara Dalam Angka 2016* (Medan: BPS, 2016), hlm. 5.

Darurat R.I. Nomor 22/Pem/PDRI pada tanggal 17 Mei 1949, jabatan Gubernur Sumatera Utara diiadakan. Selanjutnya dengan Ketetapan Pemerintah Darurat R.I. pada tanggal 17 Desember 1949, dibentuk Provinsi Aceh dan Provinsi Tapanuli/Sumatera Timur. Kemudian, dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 5 Tahun 1950 pada tanggal 14 Agustus 1950, ketetapan tersebut dicabut dan dibentuk kembali Provinsi Sumatera Utara.

Dengan Undang-Undang R.I. No. 24 Tahun 1956 yang diundangkan pada tanggal 7 Desember 1956, dibentuk Daerah Otonom Provinsi Aceh, sehingga wilayah Provinsi Sumatera Utara sebahagian menjadi wilayah Provinsi Aceh.

2. Kondisi Geografis Sumatera Utara

Provinsi Sumatera Utara terletak pada 1° - 4° Lintang Utara dan 98° - 100° Bujur Timur, Luas daratan Provinsi Sumatera Utara 72.981,23 km². Sumatera Utara pada dasarnya dapat dibagi atas:²

- a. Pesisir Timur merupakan wilayah di dalam provinsi yang paling pesat perkembangannya karena persyaratan infrastruktur yang relatif lebih lengkap daripada wilayah lainnya. Wilayah pesisir timur juga merupakan wilayah yang relatif padat konsentrasi penduduknya dibandingkan wilayah lainnya. Pada masa kolonial Hindia-Belanda wilayah ini termasuk *residentie Sumatra's Oostkust* bersama provinsi Riau

²[http: www. Sumutprov.go.id](http://www.sumutprov.go.id), diakses 22 Nopember 2017 Pukul 10.00 WIB.

- b. Di wilayah tengah provinsi berjajar pegunungan bukit barisan. Di pegunungan ini terdapat beberapa wilayah yang menjadi kantong-kantong konsentrasi penduduk. Daerah di sekitar Danau Toba dan Pulau Samosir , merupakan daerah padat penduduk yang menggantungkan hidupnya kepada danau ini.
- c. Pesisir Barat merupakan wilayah yang cukup sempit, dengan komposisi penduduk yang terdiri dari masyarakat Batak, Minangkabau, dan Aceh. Namun secara kultur dan etnolinguistik, wilayah ini masuk ke dalam budaya dan Bahasa Minangkabau.

Terdapat 419 pulau di provinsi Sumatera Utara. Pulau-pulau terluar adalah pulau Simuk (kepulauan Nias) dan pulau Berhala di selat Sumatera (Malaka). Kepulauan Nias terdiri dari pulau Nias sebagai pulau utama dan pulau-pulau kecil lain di sekitarnya. Kepulauan Nias terletak di lepas pantai pesisir barat. Pusat pemerintahan terletak di Gunung Sitoli. Kepulauan Batu terdiri dari 51 pulau dengan 4 pulau besar: Sibulasi, Pini, Tanahbala, Tanahmasa. Pusat pemerintahan di Pulau Telo di pulau Sibulasi. Kepulauan Batu terletak di tenggara kepulauan Nias. Pulau-pulau lain di Sumatera Utara: Imanna, Pasu, Bawa, Hamutaia, Batumakalele, Lego, Masa, Bau, Simaleh, Makole, Jake, dan Sigata, Wunga.

Di Sumatera Utara saat ini terdapat dua taman nasional, Menurut Keputusan Menteri Kehutanan, Nomor 44 Tahun 2005, luas hutan di Sumatera Utara saat ini 3.742.120 hektar (ha). Yang terdiri dari

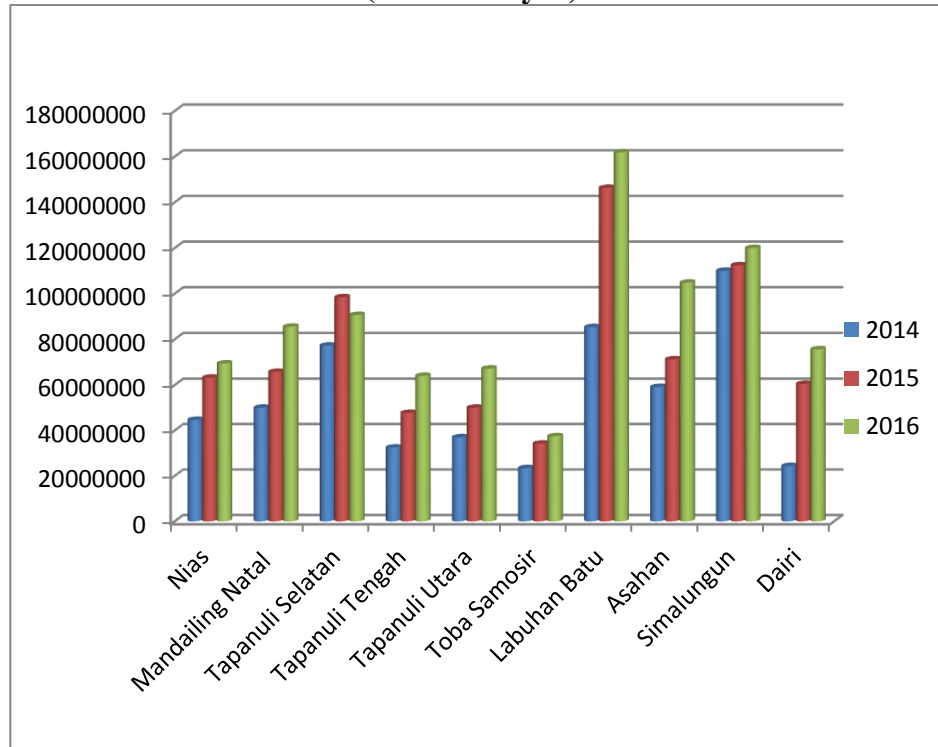
Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam seluas 477.070 ha, Hutan Lindung 1.297.330 ha, Hutan Produksi Terbatas 879.270 ha, Hutan Produksi Tetap 1.035.690 ha dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi seluas 52.760 ha. Namun angka ini sifatnya secara *de jure* saja. Sebab secara *de facto*, hutan yang ada tidak seluas itu lagi. Terjadi banyak kerusakan akibat perambahan dan pembakaran liar. Sejauh ini, sudah 206.000 ha lebih hutan di Sumut telah mengalami perubahan fungsi. Telah berubah menjadi lahan perkebunan, transmigrasi. Dari luas tersebut, sebanyak 163.000 ha untuk areal perkebunan dan 42.900 ha untuk areal transmigrasi.

B. Gambaran Umum Data Penelitian

1. Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang N0. 23 Tahun 2014 pendapatan asli daerah adalah pendapatan asli yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah dengan peraturan Perundang-Undangan. Pendapatan asli daerah tersebut adalah pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan daerah yang dipisahkan dan lain-lain, pendapaan daerah yang sah diterima dan digunakan untuk pembiayaan pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan daerah. Berikut pendapatan asli daerah dari sepuluh kabupaten di provinsi Sumatera Utara tahun 2014-2016.

Grafik 4.1
PAD Di Beberapa Kabupaten Provinsi Sumatera Utara 2014-2016
(Dalam Milyar)



Sumber: Badan Pusat Statistik (Data Diolah)

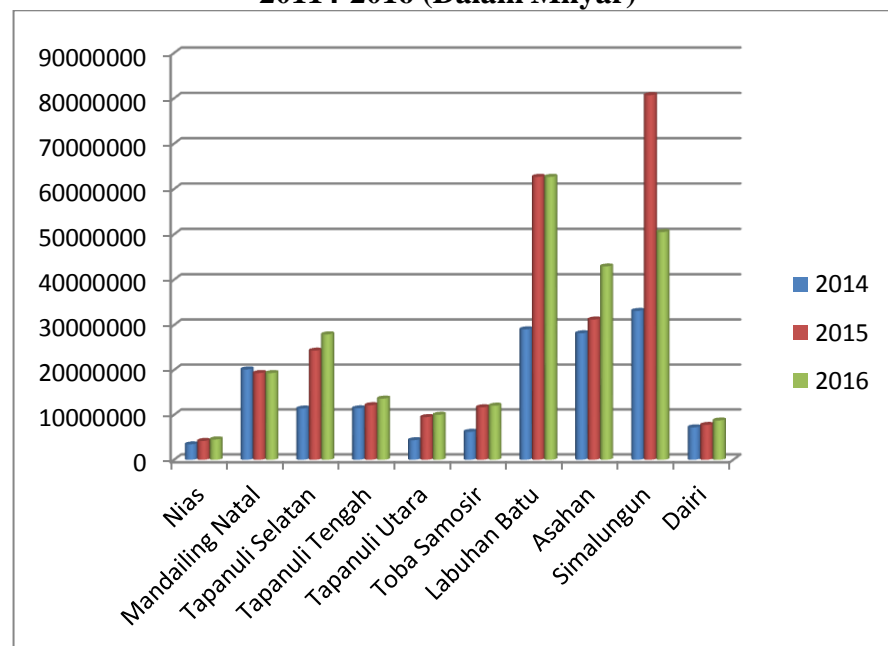
Dari grafik 4.1 di atas menunjukkan nilai pendapatan asli daerah dari tahun 2014 sampai tahun 2016 meningkat pada setiap Kabupaten. Dapat dilihat mulai dari Kabupaten Nias sebesar Rp 44.641.875.000, Rp 63.227.700.000 dan Rp 69.414.470.000. Mandailing Natal sebesar Rp 50.000.000.000, Rp 65.750.595.000 dan Rp 85.508.995.000, Tapanuli Selatan sebesar Rp 77.252.840.000, Rp 98.438.746.000 dan Rp 90.666.249.000, Tapanuli Tengah sebesar Rp 32.447.191.000, Rp 47.720.446.000 dan Rp 64.005.291.000, Tapanuli Utara sebesar Rp 32.447.191.000, Rp 50.000.000.000 dan Rp 67.183.704.000.

Selanjutnya Kabupaten Toba Samosir sebesar Rp 23.408.574.000, Rp 34.197.975.000 dan Rp 37.451.580.000, Labuhan Batu sebesar Rp 85.350.446.000, Rp 34.197.975.000 dan Rp 161.886.178.000, Asahan sebesar Rp 59.129.772.000, Rp 71.225.889.000 dan Rp 104.816.668.000, Simalungun sebesar Rp 110.000.000.000, Rp 112.414.289.000 dan Rp 119.980.275.000, Dairi sebesar Rp 24.331.000.000, Rp 60.481.900.000 dan Rp 75.647.999.000.

2. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan. Berikut grafik pajak daerah tahun 2014-2016.

Grafik 4.2
Pajak daerah dibebberapa kabupaten provinsi Sumatera Utara 2014-2016 (Dalam Milyar)



Sumber: Badan Pusat Statistik (Data Diolah)

Berdasarkan tabel 4.2 di atas menunjukkan bahwa pajak daerah pada tahun 2014 sampai 2016 dari berbagai Kabupaten terus mengalami peningkatan dapat dilihat dari Kabupaten Nias sebesar Rp 3.443.000.000, Rp 4.203.000.000 dan Rp 4.547.870.000, Mandailing Natal sebesar Rp 20.128.000.000, Rp 19.330.000.000 dan Rp 19.330.000.000, Tapanuli Selatan sebesar Rp 11.419.000.000, Rp 24.315.707.000 dan Rp 27.940.052.000, Tapanuli Tengah sebesar Rp 11.462.429.000, Rp 12.154.983.000 dan Rp 13.638.019.000, Tapanuli Utara sebesar Rp 4.366.126.000, Rp 9.510.525.000 dan Rp 10.030.000.000.

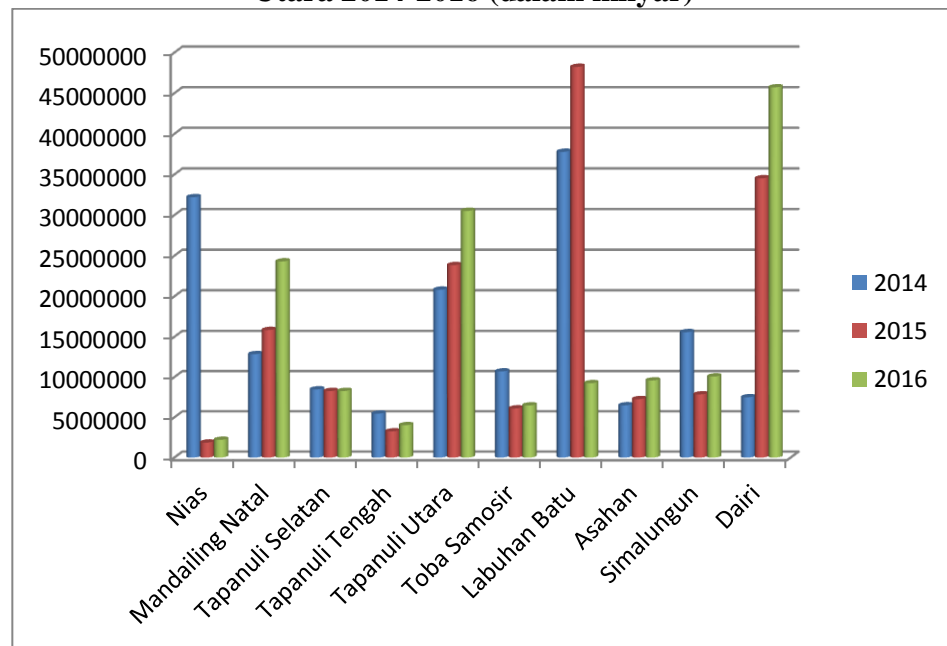
Selanjutnya Kabupaten Toba Samosir sebesar Rp 6.225.683.000, Rp 11.698.367.000 dan Rp 12.048.367.000, Asahan sebesar Rp 28.168.310.000, Rp 31.241.119.000 dan Rp 42.930.000.000, Simalungun sebesar Rp 28.168.310.000, Rp 80.716.255.000 dan Rp 50.525.000.000, Kabupaten Dairi sebesar Rp 7.226. 000.000, Rp 7.766.000.000 dan Rp 8.766.000.000.

3. Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan pajak daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Oleh karena itu, setiap pungutan yang dilakukan PEMDA senantiasa berdasarkan prestasi dan jasa yang diberikan kepada masyarakat sehingga, keleluasaan retribusi daerah terletak pada yang

dapat dinikmati oleh masyarakat. Jadi, retribusi sangat berhubungan erat dengan jasa layanan yang diberikan pemerintah daerah kepada yang membutuhkan.

Grafik 4.3
Retribusi Daerah Di Beberapa Kabupaten Provinsi Sumatera Utara 2014-2016 (dalam milyar)



Sumber: Badan pusat Statistik (data diolah)

Berdasarkan grafik 4.3 di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2014 sampai 2016 retribusi daerah mengalami fluktuasi dapat dilihat mulai dari Kabupaten Nias sebesar Rp 32.200.375.000, Rp 1.868.200.000 dan Rp 2.206.200.000, Mandailing Natal sebesar Rp 12.852.000.000, Rp 15.852.097.000 dan Rp 24.302.097.000, Tapanuli Selatan sebesar Rp 8.472.453.000, Rp 8.274.492.000 dan Rp 8.274.492.000, Tapanuli Tengah sebesar Rp 5.454.891.000, Rp 3.255.926.000 dan Rp 3.255.926.000, Tapanuli Utara sebesar Rp 20.816.606.000, Rp 23.840.418.000 dan Rp 30.520.000.000.

Selanjutnya Kabupaten Toba Samosir sebesar Rp 10.704.016.000, Rp 6.107.048.000 dan Rp 6.479.213.000, Labuhan Batu sebesar Rp 37.788.863.000, Rp 48.241.585.000 dan Rp 9.241.585.000, Asahan sebesar Rp 6.495.281.000, Rp 7.260.372.000 dan Rp 9.586.407.000, Simalungun sebesar Rp 15.583.521.000, Rp 7.848.034.000 dan Rp 10.076.451.000, Dairi sebesar Rp 7.495.000.000, Rp 34.528.145.000 dan Rp 45.717.493.000.

C. Hasil Analisis Data

Hasil analisis data di bawah ini adalah data-data yang sudah di Logaritma Naturalkan (LN), sehingga data yang diperoleh jumlahnya lebih kecil.

1. Analisis Statistik deskriptif

Adapun analisis deskriptif dalam penelitian ini menggunakan menu deskriptif dengan hasil sebagai berikut.

Tabel 4.1
Hasil Analisis Deskriptif

	Pendapatan Asli Daerah	Pajak daerah	Retribusi Daerah
Mean	24.73333	23.46667	23.16667
Median	25.00000	23.00000	23.00000
Maximum	26.00000	25.00000	25.00000
Minimum	20.00000	22.00000	21.00000
Std. Dev.	1.048261	0.899553	-0.011663
Skewness	-3.103779	2.287965	3.384307
Kurtosis	15.11155	2.287965	3.384307
Jarque-Bera	231.5294	0.684823	0.185295
Probability	0.000000	0.710056	0.911515
Sum	742.0000	704.0000	695.0000
Sum Sq. Dev.	31.86667	23.46667	22.16667
Observations	30	30	30

Sumber: *Ouput Eviews 9*

Berdasarkan tabel 4.1 di atas dapat dilihat bahwa variabel pendapatan asli daerah dengan jumlah data (N) sebanyak 30 mempunyai nilai *mean* 24.73333 dengan nilai minimum 20.00000 dan nilai maximum 26.00000 serta standar deviasinya sebesar 1.048261. Variabel pajak daerah dengan jumlah data (N) sebanyak 30 nilai *mean* 23.46667 dengan nilai minimum 22.00000 dan nilai maximum 25.00000 serta standar deviasinya 0.899553. Variabel retribusi daerah dengan jumlah data (N) mempunyai nilai *mean* 23.16667 dengan nilai minimum 21.00000 dan nilai maximum 25.00000 serta standar deviasinya 3.384307. Berdasarkan gambaran keseluruhan sampel yang berhasil dikumpulkan telah memenuhi syarat untuk diteliti.

2. Uji Normalitas

Uji normalitas secara formal dapat dideteksi dari metode yang dikembangkan oleh *Jarque-Bera* (JB). Metode J-B ini didasarkan pada sampel besar yang diasumsikan bersifat *asymptotic*. Untuk mengetahui data berdistribusi normal atau tidak maka digunakan uji normalitas dengan menggunakan uji *Jarque-Bera*. Salah satu asumsi dalam analisis statistik adalah data berdistribusi normal. *Jarque-Bera* adalah uji statistik untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal. Dengan ketentuan bila $J-B > \alpha$ (0,05), maka data berdistribusi normal.

Tabel 4.2
Hasil Uji Normalitas

Variabel	Notasi	Jarque-Bera	Hasil JB dengan (α)	Interpretasi
PAD	Y	231.52	0.05	Normal
PD	X1	0.68	0.05	Normal
RD	X2	0.18	0.05	Normal

Hasil uji normalitas pada tabel IV. 2 di atas variabel tersebut yaitu pendapatan asli daerah, pajak daerah, dan retribusi daerah berdistribusi normal karena memiliki J-B yang lebih besar dari 0,05.

3. Uji Pemilihan Model

Prioritas dalam memilih model regresi terbaik dalam penelitian ini yaitu dengan metode uji *chow* (*likelihood ratio*) untuk membandingkan antara *common effect* dengan *fixed effect*. Uji hausman digunakan untuk menguji model *fixed effect* dan *random effect*. Seluruh pengelolaan data tersebut dilakukan dengan menggunakan program *evIEWS*.

a. Ordinary least Square (Common Effect)

Merupakan pendekatan model data panel yang paling sederhana hanya mengkombinasikan data *time series* dan *cross section* dan menggunakan teknik kuadrat terkecil.

Tabel 4.3
Hasil regresi menggunakan *common effect*

Dependent variable: PAD				
Method: panel least squares				
Date: 03/16/18 Time: 11.18				
Sample:2014 2016				
Periode included: 3				
Cross –section included: 10				
Total panel (balanced) observation: 30				
Variable	Coefficient	Std. eror	t-statistik	Prob
PD	0.715358	0.182573	3.918201	0.0005
RD	-0.225789	0.187850	- 1.101966	0.2398

C	13.17710	5.448806	2.418806	0.2226
R-Squared	0364997	Mean Devendent var		24.73333
Adjusted R-squared	0.317960	S.D Devendent var		1.048261
S.E of regression	0.865714	Akaike info criterion		2.644114
Sum squared resid	20.23542	Schwarz crerion		2.784234
Log likelihood	-38.66171	Hannan-quinn criter		2.688940
F-statistik	7.759751	Durbin-watson stat		1.687960
Prob (F-statistic)	0.002175			

Sumber: Output Eviews 9

b. Metode *Fixed Effect*

Model regresi dengan model efek tetap mengasumsikan bahwa perbedaan antar individu diakomodasi dari perbedaan intersepanya.

Untuk model *fixed effect* dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4. 4
Hasil regresi menggunakan model efek tetap (*fixed effect*)

Devendent variable: PAD				
Method: panel least squares				
Date: 03/06/18 Time: 11.23				
Sample:2014 2016				
Periode include: 3				
Cross –section included: 10				
Total panel (balanced) observation: 30				
Variable	Coefficient	Std. eror	t-statistik	Prob
PD	0.625000	0.524333	1.191990	0.2487
RD	-0.785714	0.280268	-2.803439	0.0117
C	28.26905	13.91327	2.031804	0.0572
Effect Specification				
R-Squared	0.585886	Mean Devendent var		24.73333
Adjusted R-squared	0.332817	S.D Devendent var		1.048261
S.E of regression	0.856233	Akaike info criterion		2.816626
Sum squared resid	13.19643	Schwarz crerion		3.377105
Log likelihood	-30.24939	Hannan-quinn criter		2.995928
F-statistik	2.315119	Durbin-watson stat		2.031289
Prob (F-statistic)	0.055021			

Sumber: Output Eviews 9

Setelah hasil dari *common effect* dan *fixed effect* diperoleh maka selanjutnya dilakukan uji chow. Pengujian tersebut dibuat untuk memilih model yang paling tepat diantara model *common effect* dan *fixed effect*. Hasil uji chow test dapat dilihat pada tabel IV. 5 berikut.

Tabel 4. 5
Uji chow

Redundant Fixed Effect Equation: FE Test cross-section fixed effects			
Effect Test	Statistic	Df	Prob.
Cross-section F	1.066802	(9.18)	0.4305
Cross-section Chi-squared	12.824649	9	0.1707

Sumber: Output Eviews

Pemilihan model regresi antara *common effect* dan *fixed effect* di uji dengan metode *uji chow* atau *likelihood ratio* yang mempunyai hipotesis sebagai berikut:

H_0 : *common effect* yang paling tepat

H_a : *fixed effect* yang paling tepat

Dimana:

$F_{hitung} > F_{tabel} = H_0$ ditolak, maka H_a diterima

$F_{hitung} < F_{tabel} = H_0$ diterima, maka H_a ditolak

Hasil uji menunjukkan bahwa nilai *chi-square* hitung adalah sebesar 12.824649 dan nilai *chi-square* dengan nilai df 9 dan α 0,05 adalah sebesar 16.919. Dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak karena nilai *chi-square* hitung 12,824649 < nilai *chi-square table* 16,919 . Maka model yang paling sesuai adalah *common effect*. Selanjutnya *common effect* akan diuji dengan *random effect* untuk memilih model terbaik.

c. *Random Effect*

Syarat utama melakukan teknik model random adalah jumlah *cross-section* harus lebih banyak dari jumlah variabel independen yang diteliti. Jumlah *cross-section* dalam penelitian ini adalah 10 (sepuluh) kabupaten, sedangkan jumlah variabel independen 2 (dua), dengan demikian analisis regresi dengan model *effect random* dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.6
Hasil Regresi Menggunakan *Random Effect*

Dependent Variable: Pad				
Method: Panel EGLS (Cross-Section Random Effect)				
Date: 03/16/18 Time: 11.26				
Sample: 2014 2016				
Periode included: 3				
Cross-section included: 10				
Total panel (balanced) observation: 30				
Swamy and Arora estimator of component variances				
Variable	coeficient	Std. eror	t-statistik	Prob
PD	0.715356	0.180573	3.961585	0.0005
RD	-0.225789	0.185793	-1.215275	0.2348
RD	13.17710	5.389135	2.445124	0.0213
Effect specification				
			S.D	Rho
Cross-section random			0.000000	0.0000
Idiosyncratic random			0.856233	1.0000
Weighted statistics				
R-squared	0.364997	Mean dependent var		24.73333
Adjusted R-squared	0.317960	S.D. dependent var		1.048261
S.E. of regression	0.865714	Sum squared resid		20.23542
F-statistics	7.759751	Durbin-watson stat		1.687960
Prob(F-statistic)	0.002175			
Unweighted statistics				
R-squared	0.364997	Mean dependent var		24.73333
Sum squared resid	20.23542	Durbin-watson stat		1.687960

Sumber: *Output Eviews 9*

Setelah hasil dari *fixed effect* dan *random effect* diperoleh maka selanjutnya dilakukan uji hausman test. Pengujian tersebut

dilakukan untuk memilih model yang paling tepat diantara model FE dan RE. hasil uji husman test dapat dilihat pada tabel 4.7

Tabel 4.7
Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects-Hausman Test			
Equation: RE			
Test cross-section random effects			
Test summary	Chi-Sq Statistic	Chi-s-Sq.df	Prob.
Cross-section random	7.120349	2	0.0284

Sumber: output Eviews 9

Berdasarkan hasil uji hausman di atas diperoleh *Chi-Square* 7.120349 dan df 2 serta nilai signifikannya 0,05 maka hasilnya 5,991. Jadi dapat disimpulkan nilai *Chi-Square* lebih besar dari nilai nilai *Chi Square* tabel 7.120349 > 5,991 yang berarti H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan demikian model yang paling sesuai adalah model efek tetap (*fixed effect*). Karena model yang terpilih adalah *fixed effect*, maka perlu dilakukan pengujian *Langrangge Multiplier* (LM) test. Uji ini dilakukan untuk membandingkan model mana yang paling tepat antara CE dan RE.

Nilai LM_{hitung} akan dibandingkan dengan nilai *Chi Square Table* dengan derajat kebebasan (*degree of freedom*) sebanyak jumlah variabel independen (bebas atau X) dan α atau tingkat signifikansi sebesar 5% (0.05) yang ditentukan dari awal penelitian. Pengambilan kesimpulannya adalah sebagai berikut:

Jika $LM_{hitung} > Chi-Square Table$, maka model yang terbaik adalah RE

Jika $LM_{hitung} < \text{Chi-Square Table}$, maka model yang terbaik adalah CE

Berikut perhitungan pengujian LM Test:

$$\begin{aligned}
 LM_{hitung} &= \frac{nT}{2(T-1)} \left[\frac{T^2 \sum e^{-2}}{\sum e^2} - 1 \right]^2 \\
 LM &= \frac{10.3}{2(3-1)} \left[\frac{3^2 \cdot 777.783.439.634.505.000.000.000.000.000}{14.358.645.650.743.600.000.000.000.000.000} - 1 \right]^2 \\
 &= \frac{30}{4} \left[\frac{9.777.783.439.634.505}{14.358.645.650.743.600} - 1 \right]^2 \\
 &= \frac{30}{4} [0.68096 - 1]^2 \\
 &= \frac{30}{4} [0.46371 - 1] \\
 &= \frac{30}{4} [0.53629] \\
 &= 7,5 [0.53629] \\
 &= 4,022175
 \end{aligned}$$

Berdasarkan pengujian diatas nilai $LM_{hitung} = 4,022175$, maka dari hasil tersebut jika dibandingkan dengan nilai *Chi-Square Table* dengan derajat kebebasan sebanyak jumlah variabel independen dan α sebesar 5% (0,05) adalah 5,99146. Dapat disimpulkan $LM_{hitung} < \text{Chi-Square Table}$ ($4,022175 < 5,99146$), dengan demikian model CE lebih baik dibandingkan dengan model RE.

4. Uji Asumsi Klasik

Uji ini menggunakan regresi linear berganda untuk mencari apakah pajak daerah dan retribusi daerah yang lebih dominan mempengaruhi pendapatan asli daerah. Perlu dilakukan uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi.

a. Uji Multikolineritas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi data panel ditemukan adanya korelasi antar variabel. Model yang baik adalah model yang tidak terjadi korelasi antar independennya. Uji multikolinearitas muncul jika diantara variabel independen memiliki korelasi yang tinggi. Untuk menguji masalah multikolinearitas dapat melihat matriks korelasi dari variabel bebas, jika terjadi koefisien korelasi lebih 0,80 maka terdapat multikolinearitas.

Tabel 4.8
Hasil Uji Multikolinearitas

	PD	RD
PD	1.000000	0.204612
RD	0.204612	1.000000

Sumber: Output Eviews 9

Dari hasil korelasi yang dihasilkan dan tersaji pada tabel 4.8 di atas dapat dilihat bahwa variabel pajak daerah dan retribusi daerah < dari 0,80, berarti tidak ada koefisien yang cukup besar. Berdasarkan hasil di atas dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas karena koefisien korelasi antar variabel pajak

daerah dan retribusi daerah masih di bawah syarat adanya multikolinearitas yaitu 0,80.

b. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas merupakan varian residual yang tidak konstan pada regresi sehingga akurasi hasil prediksi menjadi diragukan. Pada model efek tetap tidak membutuhkan asumsi terbebasnya model, dan uji heteroskedastisitas harus di uji mengingat adanya data penelitian yang digunakan merupakan data *cross section*, maka dapat dicurigai bahwa terdapat gejala heteroskedastisitas. Untuk itu dapat dilakukan dengan menggunakan uji *white* pada estimasi Eviews dan hasilnya adalah sebagai berikut.

Tabel 4.9
Hasil Uji White

F-statistik	2.392815	Prob.F(5,24)	0.0185
Obs*Rquared	10.14367	Prob. Chi-Square(5)	0.3194
Scaled explained SS	8.92564	Prob. Chi-Squared(5)	0.8154

Sumber: Output Eviews 9

Berdasarkan tabel 4.9 di atas diketahui nilai Obs*R-squared adalah 10.14367 dan nilai probabilitasnya 0.3194 dan nilai $\alpha = 0,05$. Dari hasil output yang didapatkan, maka dapat disimpulkan bahwa $0.3194 > 0,05$, dengan demikian variabel pajak daerah (X1) dan retribusi daerah (X2) tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresi ini.

c. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi merupakan hubungan antara residual satu observasi dengan residual observasi lainnya. Autokorelasi lebih mudah timbul pada data yang bersifat runtut waktu, karena berdasarkan sifatnya, data masa sekarang dipengaruhi oleh data pada masa-masa sebelumnya. Meskipun demikian, tetap dimungkinkan autokorelasi dijumpai pada data yang bersifat antar objek (*cross section*). Syarat autokorelasi yakni statistik DW bernilai 2 (mendekati), maka ρ akan bernilai 0, yang berarti tidak terjadi autokorelasi. Hasil dari uji autokorelasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.10
Hasil Uji Autokorelasi

R-Squared	0.364997	Mean Devendent var	24.73333
Adjusted R-squared	0.317960	S.D Devendent var	1.048261
S.E of regression	0.865714	Akaike info criterion	2.644114
Sum squared resid	20.23542	Schwarz crerion	2.784234
Log likelihood	-38.66171	Hannan-quinn criter	2.688940
F-statistik	7.759751	Durbin-watson stat	1.687960
Prob (F-statistic)	0.002175		

Sumber: *Output Eviews 9*

Berdasarkan hasil uji autokorelasi pada tabel 4.10 di atas terlihat bahwa nilai DW yang diperoleh adalah sebesar 1.687960. hal ini menunjukkan bahwa $-2 < 1.687960 < + 2$, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak terjadi autokorelasi.

5. Uji Hipotesis dengan Analisis Regresi Data Panel

1) Uji Koefisien Regresi Secara Parsial dengan T-test

Untuk melihat besarnya pengaruh variabel pajak daerah dan retribusi daerah secara parsial terhadap pendapatan asli daerah, uji ini digunakan dengan menggunakan uji pengujian secara parsial yang digunakan untuk menguji pengaruh setiap variabel independen terhadap variabel dependennya.

Tabel 4.11
Uji t

Variable	Coefficient	Stand. Error	t-statistik	Prob
PD	0.715358	0.182573	3.918201	0.0005
RD	-0.225789	0.187850	-1.101966	0.2398
C	13.17710	5.448806	2.418806	0.2226

Sumber: Output Eviews 9

Kaidah pengujian uji t adalah jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan sebaliknya jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, taraf signifikansi α 0,05. K menunjukkan banyaknya variabel dalam model regresi termasuk variabel tak bebas. Untuk model regresi tiga variabel $df = n - k = n - 3$.³ Interpretasi hasil pengujian uji t pada tabel di atas adalah sebagai berikut.

a. Pengaruh pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah

Hasil pengujian regresi data panel menunjukkan hasil t_{hitung} untuk variabel independen pajak daerah adalah sebesar 3.918201, dan nilai t_{tabel} dengan nilai signifikansi $\alpha = 0,05$ dan $df = (n - k)$, sehingga $df = (30 - 3) = 27$ jadi nilai t_{tabel} adalah

³Muhammad Firdaus, *Ekonometrika Suatu Pendekatan Aplikatif* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), hlm. 88.

sebesar 1.70329 dan dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $3.918205 > 1.70113$ sehingga H_0 ditolak, maka pajak daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

b. Pengaruh retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah

Hasil pengujian regresi data panel menunjukkan hasil t_{hitung} untuk variabel independen retribusi daerah adalah sebesar -1.101966 dan nilai t_{tabel} dengan nilai signifikansi $\alpha = 0,05$ dan $df = (n-k)$, sehingga $df = (30-3) = 27$ jadi nilai $-t_{tabel}$ adalah sebesar -1.70113 dan dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai $-t_{hitung} < -t_{tabel}$ yaitu $(-1.101966 < -1.70329)$ sehingga H_0 diterima dan H_a ditolak, maka retribusi daerah tidak berpengaruh negatif terhadap pendapatan asli daerah.

2) Uji Koefisien Regresi Secara Simultan dengan F-test

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel independen. Pengujian ini dilakukan secara simultan yaitu pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah. Pengujian ini dilakukan dengan kriteria jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka H_0 diterima. Untuk menghitung nilai F_{tabel} pengujian ini dilakukan pada signifikansi 0,05. Tabel distribusi F dicari dengan derajat kebebasan (df) $n-k$ atau $30-3 = 27$ (n adalah jumlah sampel dan k adalah jumlah variabel independen)

jadi F_{tabel} sebesar 2.96. untuk nilai F_{hitung} dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.12
Uji F

R-Squared	0.364997	Mean Devendent var	24.73333
Adjusted R-squared	0.317960	S.D Devendent var	1.048261
S.E of regression	0.865714	Akaike info criterion	2.644114
Sum squared resid	20.23542	Schwarz crerion	2.784234
Log likelihood	-38.66171	Hannan-quinn criter	2.688940
F-statistik	7.759751	Durbin-watson stat	1.687960
Prob (F-statistic)	0.002175		

Sumber: output Eviews 9

Dapat dilihat bahwa nilai F_{hitung} adalah sebesar 7.759751 maka dapat disimpulkan bahwa nilai $F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}}$ ($7,75 > 2,96$), dengan demikian H_0 ditolak. Hal ini berarti bahwa variabel pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh secara simultan terhadap pendapatan asli daerah di beberapa kabupaten provinsi Sumatera Utara tahun 2014 sampai 2016. Sehingga model regresi dapat digunakan memprediksi variabel dependen.

3) Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur sejauh mana kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Dalam penelitian ini memiliki dua variabel bebas maka digunakan *R-Squared* sebagai koefisien determinasi. Nilai determinasi *R-Squared* dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.13
Uji R^2

R-Squared	0.364997	Mean Devendent var	24.73333
Adjusted R-squared	0.317960	S.D Devendent var	1.048261

Sumber: Output Eviews 9

Berdasarkan *output eviews* di atas maka hasil koefisien determinasi R^2 adalah sebesar 0.36 atau 36%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen dalam model penelitian ini mampu menjelaskan 36% terhadap variabel dependennya, sedangkan sisanya sebesar 64% dipengaruhi oleh faktor lain. Berarti masih ada beberapa model yang dapat mempengaruhi pendapatan asli daerah.

4) Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda adalah hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen dengan variabel dependen. Dihitung dengan menggunakan bentuk persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$PAD = \alpha + \beta_1 PD + \beta_2 RD + e$$

Keterangan:

PAD = Pendapatan Asli Daerah

α = Konstanta

$\beta_1 \beta_2$ = Koefisien regresi berganda (nilai peningkatan atau pun penurunan)

PD = Pajak Daerah

RD = Retribusi Daerah

e = Variabel Gangguan

Tabel 4.14
Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Variable	Coefficient	Stand. Error	t-statistik	Prob
PD	0.715358	0.182573	3.918201	0.0005
RD	-0.225789	0.187850	-1.101966	0.2398
C	13.17710	5.448806	2.418806	0.2226

Sumber: Output Eviews 9

Berdasarkan *output eviews* di atas maka model analisis regresi linear berganda antara variabel X terhadap variabel Y dapat ditransformasikan dalam model persamaan berikut:

$$Y = 13.17710 + 0.715358 (PD) + (-0.225789) (RD)$$

Dari hasil persamaan regresi linear berganda tersebut, menunjukkan koefisien dari $\beta_1\beta_2$ bernilai positif dan negatif. Hal ini menunjukkan apabila variabel-variabel bebas ditingkatkan maka akan menimbulkan peningkatan atau penurunan pada variabel dependennya. Artinya:

1. Nilai konstanta sebesar 13,17710 menunjukkan bahwa jika pajak daerah dan retribusi daerah nilainya 0, maka nilai pendapatan asli daerah sebesar 13,17710%.
2. Jika nilai pajak daerah (X1) naik sebesar Rp. 1 maka akan meningkatkan nilai pendapatan asli daerah pada observasi ke I dan periode ke t sebesar 0,715358 dengan asumsi semua variabel tetap.
3. Jika nilai retribusi daerah (X2) naik sebesar Rp. 1 pada observasi ke I dan ke t akan menurunkan nilai pendapatan asli daerah pada observasi ke I dan ke t sebesar 0,0225789.

6. Pembahasan Hasil Penelitian

Penelitian ini berjudul pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah di beberapa kabupaten provinsi Sumatera Utara tahun 2014-2016. Dari hasil analisis data yang dilakukan pada penelitian ini dengan menggunakan bantuan program *Eviews* versi 9. Berdasarkan uji normalitas nilai J-B yang diperoleh dari variabel pajak daerah sebesar 0,68, variabel retribusi daerah sebesar 0,18 dan variabel pendapatan asli daerah sebesar 231,52, yang berarti data tersebut berdistribusi normal karena lebih besar dari 0,05.

Untuk uji asumsi klasik berdasarkan uji multikolinieritas variabel pajak daerah dan retribusi daerah lebih kecil dari 0,80 ($0,204612 < 0,80$), artinya tidak terjadi multikolinieritas pada data yang diuji. Kemudian untuk uji heteroskedastisitas diketahui bahwa nilai prob. Obs*R-squared (Y) sebesar 0,3194. Jika nilai ini dibandingkan dengan tingkat signifikan 5 persen ($0,3194 > 0,05$). Dengan demikian variabel pajak daerah (X1), dan retribusi daerah (X2) tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi. Selanjutnya untuk uji autokorelasi menunjukkan bahwa nilai Durbin-Watson $1,68790$ yakni $-2 < 1,68790 < +2$, artinya tidak terjadi autokorelasi.

Berdasarkan hasil uji t menunjukkan bahwa variabel pajak daerah memiliki $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $3,918205 > 1,70329$ sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima, maka pajak daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Hasil penelitian ini sesuai dengan yang dilakukan oleh Aprilia Sari, yang dalam penelitiannya menunjukkan bahwa pajak daerah

berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Ini juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada pasal 6 ayat 1, yang menyatakan bahwa sumber-sumber penerimaan pendapatan asli daerah salah satunya adalah pajak daerah, berarti komponen pertumbuhan pajak daerah menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan pendapatan asli daerah.⁴

Sedangkan variabel retribusi daerah memiliki nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $-1,101196 < 1,70329$ sehingga H_0 diterima, maka retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Regina yang menyatakan bahwa retribusi daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat F-PDI di DPRD TK II, Sikka yaitu karena adanya perbedaan antara satu daerah dengan daerah lainnya dalam mengusahakan sektor retribusi, terjadi karena terdapat perbedaan-perbedaan sehingga jasa yang disiapkannya pun berbeda-beda. Ketidakmampuan dalam menyediakan jasa inilah yang menyebabkan sektor ini tidak banyak menolong pendapatan daerah. Di samping itu, masih rendahnya sumbangan sektor retribusi terhadap pendapatan daerah disebabkan adanya pembatalan hak daerah otonom untuk memungut retribusi atas berbagai komoditi strategis, misalnya cengkeh, coklat, kemiri, dan lain-lain, yang

⁴Adrian Sutedi, *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah* (Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2008), hlm. 8.

dituangkan lewat SK Mendagri Nomor 48/1984 dan Nomor 29/1986 yang sudah tentu merugikan daerah-daerah.⁵

Hasil uji F diperoleh dari nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu $(7,75 > 2,96)$ dengan demikian H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal ini berarti bahwa variabel pajak daerah (X1) dan variabel retribusi daerah (X2) berpengaruh secara simultan terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Anggaran pendapatan dan belanja daerah bersumber dari pendapatan asli daerah dan penerimaan berupa dana perimbangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Pendapatan asli daerah yang antara lain berupa pajak daerah dan retribusi daerah, diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, daerah mampu dan mengurus rumah tangganya sendiri.⁶

Selanjutnya hasil uji *R-Squared* adalah sebesar 0.36 atau 36%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen dalam model penelitian ini mampu menjelaskan 36% terhadap variabel dependennya, sedangkan sisanya sebesar 64% dipengaruhi oleh faktor lain. Berarti masih ada beberapa model yang dapat mempengaruhi pendapatan asli daerah.

⁵*Ibid.*, hlm. 85.

⁶*Ibid.*

Hasil analisis regresi linear berganda diketahui nilai konstanta sebesar 13.17710 menunjukkan bahwa pajak daerah, retribusi daerah nilainya 0, maka nilai pendapatan asli daerah nya sebesar 13,17710%. Jika nilai pajak daerah (X_1) naik sebesar Rp. 1 kali pada observasi ke I dan ke t akan menaikkan nilai pendapatan asli daerah pada observasi ke I dan periode ke t sebesar 0.715358 dengan asumsi semua variabel tetap. Jika nilai retribusi daerah (X_2) naik sebesar Rp. 1 pada observasi ke I dan ke t akan menurunkan nilai pendapatan asli daerah pada observasi ke I dan ke t sebesar -0.0225789 .

7. Keterbatasan Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah yang disusun sedemikian rupa agar hasil yang diperoleh sebaik mungkin. Namun, dalam prosesnya untuk mendapatkan hasil yang sempurna sangatlah sulit, sebab dalam pelaksanaan penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan.

Diantara keterbatasan dalam penelitian selama penyusunan skripsi ini, yaitu:

1. Keterbatasan dalam referensi yang digunakan dalam penelitian ini, sehingga kurang mendukung teori maupun masalah yang diajukan.
2. Keterbatasan mengambil data dan tahun dalam penelitian ini yang berbentuk sekunder. Dimana peneliti hanya mengambil data pendapatan asli daerah, pajak daerah dan retribusi daerah seperlunya saja.

3. Keterbatasan dalam mengambil variabel yang digunakan dalam penelitian, yaitu hanya berfokus pada variabel-variabel pajak daerah dan retribusi daerah dan pendapatan asli daerah saja, dengan tidak memperhatikan faktor-faktor lainnya seperti jumlah penduduk, pengeluaran pemerintah, dan produk domestik regional bruto.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara parsial pajak daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah yang dibuktikan dengan $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $3.918205 > 1.70239$ sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima.
2. Secara parsial retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah, yang dibuktikan dengan $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $-1.101966 < 1.70239$ sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima.
3. Secara simultan pajak daerah dan retribusi daerah memberikan pengaruh terhadap pendapatan asli daerah, yang dibuktikan dengan $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($7,75 > 2,96$) dengan demikian H_0 ditolak dan H_a diterima.

B. Saran-Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti memberikan saran yaitu:

1. Untuk peneliti selanjutnya yang tertarik dengan judul “Pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah” agar lebih digali lagi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah dan diharapkan dapat menambah variabel-variabel lain yang mempengaruhi pendapatan asli daerah.

2. Untuk Pemerintah Provinsi Sumatera Utara diharapkan agar lebih mengelola sumber-sumber pendapatan asli daerah sehingga pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah meningkat dan meratakan kesejahteraan masyarakat.
3. Untuk dunia akademik sebagai bahan untuk memperluas pemahaman dan wawasan terhadap teori.

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku

- Abdul Halim dan Syam Kusufi, *Akuntansi Sektor Publik*, Jakarta: Salemba Empat, 2013
- Adrian Sutedi, *Hukum Pajak Dan Retribusi Daerah*, Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2008.
- Anggota IKAPI, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Bandung: Fokusmedia, 2012.
- , *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Bandung: fokusmedia, 2009.
- , *Standar Akuntansi Pemerintahan*, Bandung: Fokusmedia, 2012.
- Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: PT Rajagrafindo, 2005.
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Departemen Agama, *Al-qur'an dan Terjemahan Al- Jumnatul 'Ali*, Bandung: CV J-Art, 2004.
- Duwi Priyatno, *Cara Kilat Belajar Analisis Data Dengan SPSS 20*, Yogyakarta: CV Andi Offset, 2012.
- Dwi Suwikno, *Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010.
- Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2011.
- Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008.
- Irwan Taufiq, *Akuntansi Pemerintahan Daerah*, Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana UGM, 2010.
- Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008.
- Liberty Pandiangan, *Undang-Undang Perpajakan Indonesia*, Jakarta: Erlangga, 2002.
- Masdiarmo, *Perpajakan*, Yogyakarta: CV Andi Offset, 2008.
- Muhammad Firdaus, *Ekonometrika Suatu Pendekatan Aplikatif*, Jakarta: Pt Bumi

- Mudrajad Kuncoro, *Metode Riset Bisnis dan Ekonomi*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2010.
- Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2005.
- Muhammad zain dan Suryo Hermana, *Himpunan Undang-Undang Perpajakan Jakarta*: PT Indeks, 2010), hlm. 321.
- Nachrowi Djalal Nachrowi, Dkk, *Ekonometrika untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan*, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2006.
- Nur Asnawi dan Masuhuri, *Metode Riset dan Manajemen Pemasaran*, Malang: UIN Maliki Press, 2011.
- Nurlan Darise, *Pengelolaan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan BLU*, Jakarta Barat: PT indeks, 2009.
- , *Pengelolaan Keuangan Daerah*, Jakarta Barat: PT Indeks, 2009.
- Rusady Ruslan, *Metode Penelitian public Relations dan Komunikasi*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2004.
- Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 2004.
- Siswanto Sunaryo, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Syofian Siregar, *Metode Penelitian Kuantitatif Dilengkapi Dengan Perhitungan Manual & SPSS*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2016.
- Sukardi, *Metodologi Pendidikan*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003.
- Wing Wahyu Winarno, *Analisis Ekonometrika dan Statistik Dengan Eviews*, Yogyakarta: Upt STIM YKPN, 2009.
- Y. Sri Pudyatmoko, *Pengantar Hukum Pajak Edisi Revisi*, Yogyakarta: CV Andi Offset, 2006.
- Zaki Baridwan, *Intermediate Accounting*, Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta, 2012.

B. Sumber Lain

www. Bps. Go. Id

http: www. Sumurprov. Go. Id

Arif Eka Atmaja, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Di Kota Semarang* (Skripsi, Universitas Diponegoro Semarang, 2011).

Adi Nugroho, *Analisis Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Periode 2010-2012* (Skripsi, Universitas Dian Nuswantoro Semarang, 2014).

Regina, *Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Bandung Periode 2011-2015* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Bandung, 2015).

Melida Alissa Putri Dan Sri Rahayu, *Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2010-2014)*”(Jurnal, Universitas Telkom Cirebon, 2015).

Adrian Haryanto, *Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Daerah Istimewa Yogyakarta)* (Skripsi, Universitas PGRI Yogyakarta, 2016).

Sandry Yossi Mamonto, J. B Kalangi Dan Krest D. Tolosang, *Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Modal (Studi Pada Kabupaten Bolang Mongondow Periode 2004-2013)* (Jurnal, Universitas Sam Ratulangi Manado, 2015).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS PRIBADI

1. Nama Lengkap : Nur Ainun
2. Nama Panggilan : Ainun
3. Tempat/ Tgl. Lahir : Simangambat/ 13 Juni 1996
4. Agama : Islam
5. Jenis kelamin : Perempuan
6. Anak ke : 2 (dua) dari 3 (tiga) Bersaudara
7. Alamat : Simangambat
8. Kewarganegaraan : Indonesia
9. No. Telepon/ HP : 0831-9441-3850

B. LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

1. SD Negeri 142548 Simangambat (2002-2008)
2. MTsN Siabu (2008-2011)
3. MAN Siabu (2011-2014)
4. Program Sarjana (S-1) Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (2014-2018)

C. IDENTITAS ORANG TUA

- | | |
|-----------|-----------------|
| Nama Ayah | : Gusnar |
| Pekerjaan | : Petani |
| Nama Ibu | : Nur Naningsih |
| Pekerjaan | : Petani |

Lampiran 1

Titik Persentase Distribusi *Chi-Square*

df	<i>P</i>	0,5	0,1	0,05	0,025	0,01
1		0,455	2,706	3,841	5,024	6,635
2		1,386	4,605	5,991	7,378	9,210
3		2,366	6,251	7,815	9,348	11,345
4		3,357	7,779	9,488	11,143	13,277
5		4,351	9,236	11,070	12,832	15,086
6		5,348	10,645	12,592	14,449	16,812
7		6,346	12,017	14,067	16,013	18,475
8		7,344	13,362	15,507	17,535	20,090
9		8,343	14,684	16,919	19,023	21,666
10		9,342	15,987	18,307	20,483	23,209
11		10,341	17,275	19,675	21,920	24,725
12		11,340	18,549	21,026	23,337	26,217
13		12,340	19,812	22,362	24,376	27,688
14		13,339	21,064	23,685	26,119	29,141
15		14,339	22,307	24,996	27,488	30,578

Lampiran 2

Tabel t (Pada Taraf Signifikansi 5%)

Pr	0.25	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005	0.001
df	0.50	0.20	0.10	0.050	0.02	0.010	0.002
1	1.00000	3.07768	6.31375	12.70620	31.82052	63.65674	318.30884
2	0.81650	1.88562	2.91999	4.30265	6.96456	9.92484	22.32712
3	0.76489	1.63774	2.35336	3.18245	4.54070	5.84091	10.21453
4	0.74070	1.53321	2.13185	2.77645	3.74695	4.60409	7.17318
5	0.72669	1.47588	2.01505	2.57058	3.36493	4.03214	5.89343
6	0.71756	1.43976	1.94318	2.44691	3.14267	3.70743	5.20763
7	0.71114	1.41492	1.89458	2.36462	2.99795	3.49948	4.78529
8	0.70639	1.39682	1.85955	2.30600	2.89646	3.35539	4.50079
9	0.70272	1.38303	1.83311	2.26216	2.82144	3.24984	4.29681
10	0.69981	1.37218	1.81246	2.22814	2.76377	3.16927	4.14370
11	0.69745	1.36343	1.79588	2.20099	2.71808	3.10581	4.02470
12	0.69548	1.35622	1.78229	2.17881	2.68100	3.05454	3.92963
13	0.69383	1.35017	1.77093	2.16037	2.65031	3.01228	3.85198
14	0.69242	1.34503	1.76131	2.14479	2.62449	2.97684	3.78739
15	0.69120	1.34061	1.75305	2.13145	2.60248	2.94671	3.73283
16	0.69013	1.33676	1.74588	2.11991	2.58349	2.92078	3.68615
17	0.68920	1.33338	1.73961	2.10982	2.56693	2.89823	3.64577
18	0.68836	1.33039	1.73406	2.10092	2.55238	2.87844	3.61048
19	0.68762	1.32773	1.72913	2.09302	2.53948	2.86093	3.57940
20	0.68695	1.32534	1.72472	2.08596	2.52798	2.84534	3.55181
21	0.68635	1.32319	1.72074	2.07961	2.51765	2.83136	3.52715
22	0.68581	1.32124	1.71714	2.07387	2.50832	2.81876	3.50499
23	0.68531	1.31946	1.71387	2.06866	2.49987	2.80734	3.48496
24	0.68485	1.31784	1.71088	2.06390	2.49216	2.79694	3.46678
25	0.68443	1.31635	1.70814	2.05954	2.48511	2.78744	3.45019
26	0.68404	1.31497	1.70562	2.05553	2.47863	2.77871	3.43500
27	0.68368	1.31370	1.70329	2.05183	2.47266	2.77068	3.42103
28	0.68335	1.31253	1.70113	2.04841	2.46714	2.76326	3.40816
29	0.68304	1.31143	1.69913	2.04523	2.46202	2.75639	3.39624
30	0.68276	1.31042	1.69726	2.04227	2.45726	2.75000	3.38518
31	0.68249	1.30946	1.69552	2.03951	2.45282	2.74404	3.37490
32	0.68223	1.30857	1.69389	2.03693	2.44868	2.73848	3.36531
33	0.68200	1.30774	1.69236	2.03452	2.44479	2.73328	3.35634
34	0.68177	1.30695	1.69092	2.03224	2.44115	2.72839	3.34793
35	0.68156	1.30621	1.68957	2.03011	2.43772	2.72381	3.34005
36	0.68137	1.30551	1.68830	2.02809	2.43449	2.71948	3.33262
37	0.68118	1.30485	1.68709	2.02619	2.43145	2.71541	3.32563
38	0.68100	1.30423	1.68595	2.02439	2.42857	2.71156	3.31903
39	0.68083	1.30364	1.68488	2.02269	2.42584	2.70791	3.31279
40	0.68067	1.30308	1.68385	2.02108	2.42326	2.70446	3.30688

Lampiran 3

**Tabel Distribusi F
(Pada Taraf Signifikansi 5%)**

df untuk penyebut (N2)	df untuk pembilang (N1)								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	161	199	216	225	230	234	237	239	241
2	18.51	19.00	19.16	19.25	19.30	19.33	19.35	19.37	19.38
3	10.13	9.55	9.28	9.12	9.01	8.94	8.89	8.85	8.81
4	7.71	6.94	6.59	6.39	6.26	6.16	6.09	6.04	6.00
5	6.61	5.79	5.41	5.19	5.05	4.95	4.88	4.82	4.77
6	5.99	5.14	4.76	4.53	4.39	4.28	4.21	4.15	4.10
7	5.59	4.74	4.35	4.12	3.97	3.87	3.79	3.73	3.68
8	5.32	4.46	4.07	3.84	3.69	3.58	3.50	3.44	3.39
9	5.12	4.26	3.86	3.63	3.48	3.37	3.29	3.23	3.18
10	4.96	4.10	3.71	3.48	3.33	3.22	3.14	3.07	3.02
11	4.84	3.98	3.59	3.36	3.20	3.09	3.01	2.95	2.90
12	4.75	3.89	3.49	3.26	3.11	3.00	2.91	2.85	2.80
13	4.67	3.81	3.41	3.18	3.03	2.92	2.83	2.77	2.71
14	4.60	3.74	3.34	3.11	2.96	2.85	2.76	2.70	2.65
15	4.54	3.68	3.29	3.06	2.90	2.79	2.71	2.64	2.59
16	4.49	3.63	3.24	3.01	2.85	2.74	2.66	2.59	2.54
17	4.45	3.59	3.20	2.96	2.81	2.70	2.61	2.55	2.49
18	4.41	3.55	3.16	2.93	2.77	2.66	2.58	2.51	2.46
19	4.38	3.52	3.13	2.90	2.74	2.63	2.54	2.48	2.42
20	4.35	3.49	3.10	2.87	2.71	2.60	2.51	2.45	2.39
21	4.32	3.47	3.07	2.84	2.68	2.57	2.49	2.42	2.37
22	4.30	3.44	3.05	2.82	2.66	2.55	2.46	2.40	2.34
23	4.28	3.42	3.03	2.80	2.64	2.53	2.44	2.37	2.32
24	4.26	3.40	3.01	2.78	2.62	2.51	2.42	2.36	2.30
25	4.24	3.39	2.99	2.76	2.60	2.49	2.40	2.34	2.28
26	4.23	3.37	2.98	2.74	2.59	2.47	2.39	2.32	2.27
27	4.21	3.35	2.96	2.73	2.57	2.46	2.37	2.31	2.25
28	4.20	3.34	2.95	2.71	2.56	2.45	2.36	2.29	2.24
29	4.18	3.33	2.93	2.70	2.55	2.43	2.35	2.28	2.22
30	4.17	3.32	2.92	2.69	2.53	2.42	2.33	2.27	2.21
31	4.16	3.30	2.91	2.68	2.52	2.41	2.32	2.25	2.20
32	4.15	3.29	2.90	2.67	2.51	2.40	2.31	2.24	2.19
33	4.14	3.28	2.89	2.66	2.50	2.39	2.30	2.23	2.18
34	4.13	3.28	2.88	2.65	2.49	2.38	2.29	2.23	2.17
35	4.12	3.27	2.87	2.64	2.49	2.37	2.29	2.22	2.16
36	4.11	3.26	2.87	2.63	2.48	2.36	2.28	2.21	2.15
37	4.11	3.25	2.86	2.63	2.47	2.36	2.27	2.20	2.14
38	4.10	3.24	2.85	2.62	2.46	2.35	2.26	2.19	2.14
39	4.09	3.24	2.85	2.61	2.46	2.34	2.26	2.19	2.13
40	4.08	3.23	2.84	2.61	2.45	2.34	2.25	2.18	2.12

Lampiran 4**Daftar kabupaten/kota di Sumatera Utara**

No	Kabupaten/kota	Pusat pemerintahan	kecamatan
1.	Kab. Asahan	Kisaran	25
2.	Kab. Batu Bara	limapuluh	7
3.	Kab. Dairi	Sidikalang	15
4.	Kab. Deli Serdang	Lubuk Pakam	22
5.	Kab. Humbang Hasundutan	Dolok Tanggul	10
6.	Kab. Karo	Kabanjahe	17
7.	Kab. Labuhan Batu	Rantau Parapat	9
8.	Kab. Labuhan Batu Selatan	Kota Pinang	5
9.	Kab. Labuhan Batu Utara	Aek Kanopan	8
10.	Kab. Langkat	Stabat	23
11.	Kab. Mandailing Natal	Panyabungan	23
12.	Kab. Nias	Gido	10
13.	Kab. Nias Barat	Lahomi	8
14.	Kab. Nias Selatan	Teluk Dalam	35
15.	Kab. Nias Utara	Lotu	11
16.	Kab. Padang Lawas	Sibuhuan	12
17.	Kab. Padang Lawas Utara	Gunung Tua	9
18.	Kab. Pakpak Bharat	Salak	8
19.	Kab. Samosir	Pangururan	9
20.	Kab. Serdang Bedagai	Sei Rempah	17
21.	Kab. Simalungun	Raya	31
22.	Kab. Tapanuli Selatan	Sipirok	14
23.	Kab. Tapanuli Tengah	Pandan	20
24.	Kab. Tapanuli Utara	Tarutung	15
25.	Kab. Toba Samosir	Balige	16
26.	Kota Binjai	-	5
27.	Kota Gunung Sitoli	-	6
28.	Kota Medan	-	21
29.	Kota Padangsidempuan	-	6
30.	Kota Pematang Siantar	-	8
31.	Kota Sibolga	-	4
32.	Kota Tanjung Balai	-	6
33.	Kota Tebing Tinggi	-	5

Lampiran 5

**Pendapatan Asli Daerah Tahun 2014-2016
(dalam rupiah)**

No.	Kabupaten	Pendapatan Asli Daerah		
		2014	2015	2016
1.	Nias	44.641.875.000	63.227.700.000	69.414.470.000
2.	Mandailing Natal	50.000.000.000	65.750.595.000	85.508.995.000
3.	Tapanuli Selatan	77.252.840.000	98.438.746.000	90.666.249.000
4.	Tapanuli Tengah	32.447.191.000	47.720.446.000	64.005.291.000
5.	Tapanuli Utara	36.990.862.000	50.000.000.000	67.183.704.000
6.	Toba Samosir	23.408.574.000	34.197.975.000	37.451.580.000
7.	Labuhan Batu	85.350.446.000	146.290.701.000	161.886.178.000
8.	Asahan	59.129.772.000	71.225.889.000	104.816.668.000
9.	Simalungun	110.000.000.000	112.414.289.000	119.980.275.000
10.	Dairi	24.331.000.000	60.481.900.000	75.647.999.000

Pajak Daerah (Dalam rupiah)

Kabupaten	Pajak Daerah		
	2014	2015	2016
Nias	3.443.000.000	4.203.000.000	4.547.870.000
Mandailing Natal	20.128.000.000	19.330.000.000	19.330.000.000
Tapanuli Selatan	11.419.000.000	24.315.707.000	27.940.052.000
Tapanuli Tengah	11.462.429.000	12.154.983.000	13.638.019.000
Tapanuli Utara	4.366.126.000	9.510.525.000	10.030.000.000
Toba Samosir	6.225.683.000	11.698.367.000	12.048.367.000
Labuhan Batu	29.059.600.000	62.700.000.000	62.700.000.000
Asahan	28.168.310.000	31.241.119.000	42.930.000.000
Simalungun	33.132.095.000	80.716.255.000	50.525.000.000
Dairi	7.226.000.000	7.766.000.000	8.766.000.000

Retribusi Daerah (dalam rupiah)

Kabupaten	Retribusi Daerah		
	2014	2015	2016
Nias	32.200.375.000	1.868.200.000	2.206.200.000
Mandailing Natal	12.852.000.000	15.852.097.000	24.302.097.000
Tapanuli Selatan	8.472.453.000	8.274.492.000	8.274.492.000
Tapanuli Tengah	5.454.891.000	3.255.926.000	4.028.651.000
Tapanuli Utara	20.816.606.000	23.840.418.000	30.520.000.000

Toba Samosir	10.704.016.000	6.107.048.000	6.479.213.000
Labuhan Batu	37.788.863.000	48.241.585.000	9.241.585.000
Asahan	6.495.281.000	7.260.372.000	9.586.407.000
Simalungun	15.583.521.000	7.848.034.000	10.076.451.000
Dairi	7.495.000.000	34.528.145.000	45.717.493.000

Lampiran 6

Analisis Deskriptif

	Pendapatan Asli Daerah	Pajak daerah	Retribusi Daerah
Mean	24.73333	23.46667	23.16667
Median	25.00000	23.00000	23.00000
Maximum	26.000000	25.00000	25.00000
Minimum	20.00000	22.00000	21.00000
Std. Dev.	1.048261	0.899553	-0.011663
Skewness	-3.103779	2.287965	3.384307
Kurtosis	15.11155	2.287965	3.384307
Jarque-Bera	231.5294	0.684823	0.185295
Probability	0.000000	0.710056	0.911515
Sum	742.0000	704.0000	695.0000
Sum Sq. Dev.	31.86667	23.46667	22.16667
Observations	30	30	30

Lampiran 7

Uji Normalitas

Variabel	Notasi	<i>Jarque-Bera</i>	Hasil JB dengan (α)	Interpretasi
PAD	Y	231,52	0,05	Normal
PD	X1	0,68	0,05	Normal
RD	X2	0,18	0,05	Normal

Lampiran 8

Common Effect

Devendent variable: PAD				
Method: panel least squares				
Date: 03/16/18 Time: 11.18				
Sample:2014 2016				
Periode included: 3				
Cross –section included: 10				
Total panel (balanced) observation: 30				
Variable	coeficient	Stand. eror	t-statistik	Prob
PD	0.715358	0.182573	3.918201	0.0005
RD	-0.225789	0.187850	-1.101966	0.2398
C	13.17710	5.448806	2.418806	0.2226
R-Squared	0364997	Mean Devendent var		24.73333
Adjusted R-squared	0.317960	S.D Devendent var		1.048261
S.E of regression	0.865714	Akaike info criterion		2.644114
Sum squared resid	20.23542	Schwarz crerion		2.784234
Log likelihood	-38.66171	Hannan-quinn criter		2.688940
F-statistik	7.759751	Durbin-watson stat		1.687960
Prob (F-statistic)	0.002175			

Lampiran 9

Model Efek Tetap (Fixed Effect)

Devendent variable: PAD				
Method: panel least squares				
Date: 03/06/18 Time: 11.23				
Sample:2014 2016				
Periode include: 3				
Cross –section included: 10				
Total panel (balanced) observation: 30				
Variable	coeficient	Stand. Error	t-statistik	Prob
PD	0.625000	0.524333	1.191990	0.2487
RD	-0.785714	0.280268	-2.803439	0.0117
RD	28.26905	13.91327	2.031804	0.0572
Effect Specification				
R-Squared	0.585886	Mean Devendent var		24.73333
Adjusted R-squared	0.332817	S.D Devendent var		1.048261
S.E of regression	0.856233	Akaike info criterion		2.816626
Sum squared resid	13.19643	Schwarz crerion		3.377105
Log likelihood	-30.24939	Hannan-quinn criter		2.995928
F-statistik	2.315119	Durbin-watson stat		2.031289
Prob (F-statistic)	0.055021			

Lampiran 10

Uji Chow

Redundant Fixed Effect				
Equation: FE				
Test cross-section fixed effects				
Effect Test	Statistic	df	Prob.	
Cross-section F	1.066802	(9.18)	0.4305	
Cross-section Chi-squared	12.8246499		0.1707	
Cross-section effect test equation:				
Dependent Variable: PAD				
Method: Panel Least Squares				
Date: 03/20/18 Time: 12.32				
Sample: 2014 2016				
Periods Included: 3				
Cross-section included: 10				
Total Panel (balanced): 30				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	28.26905	13.91327	2.031804	0.0572
PD	0.625000	0.524333	1.191990	0.2487
RD	-0.785714	0.280268	-2.803439	0.0117
R-Squared	0.585886	Mean Devendent var		24.73333
Adjusted R-squared	0.332817	S.D Devendent var		1.048261
S.E of regression	0.856233	Akaike info criterion		2.816626
Sum squared resid	13.19643	Schwarz crerion		3.377105
Log likelihood	-30.24939	Hannan-quinn criter		2.995928
F-statistik	2.315119	Durbin-watson stat		2.031289
Prob (F-statistic)	0.055021			

Lampiran 11

Random Effect

Dependent Variable: Pad				
Method: Panel EGLS (Cross-Section Random Effect)				
Date: 03/16/18 Time: 11.26				
Sample: 2014 2016				
Periode included: 3				
Cross-section included: 10				
Total panel (balanced) observation: 30				
Swamy and Arora estimator of component variances				
Variable	coeficient	Stand. eror	t-statistik	Prob

PD	0.715356	0.180573	3.961585	0.0005
RD	-0.225789	0.185793	-1.215275	0.2348
RD	13.17710	5.389135	2.445124	0.0213
Effect specification				
			S.D	Rho
Cross-section random			0.000000	0.0000
Idiosyncratic random			0.856233	1.0000
Weighted statistics				
R-squared	0.364997	Mean dependent var		24.73333
Adjusted R-squared	0.317960	S.D. dependent var		1.048261
S.E. of regression	0.865714	Sum squared resid		20.23542
F-statistics	7.759751	Durbin-watson stat		1.687960
Prob(F-statistic)	0.002175			
Unweighted statistics				
R-squared	0.364997	Mean dependent var		24.73333
Sum squared resid	20.23542	Durbin-watson stat		1.687960

Lampiran 12

Uji Hausman

Correlated Random Effect				
Equation: RE				
Test cross-section random effects				
Test Summary		Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq- Sq.df	Prob.
Cross-section random		7.120349	2	0.0284
Cross-section random effect test comparisons:				
Variable	Fixed	Random	Var(Diff)	Prob.
PD	0.625000	0.715356	0.242319	0.8544
RD	-0.785714	-0.225789	0.0440331	0.0076
Dependent Variable: PAD				
Method: Panel Least Squares				
Date: 03/20/18 Time: 12.32				
Sample: 2014 2016				
Periods Included: 3				
Cross-section included: 10				
Total Panel (balanced): 30				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	28.26905	13.91327	2.031804	0.0572
PD	0.625000	0.524333	1.191990	0.2487

RD	-0.785714	0.280268	-2.803439	-2.803439
	Effect Specification			
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-Squared	0.585886	Mean Devendent var	24.73333	
Adjusted R squared	0.332817	S.D Devendent var	1.048261	
S.E of regression	0.856233	Akaike info criterion	2.816626	
Sum squared resid	13.19643	Schwarz crerion	3.377105	
Log likelihood	-30.24939	Hannan-quinn criter	2.995928	
F-statistik	2.315119	Durbin-watson stat	2.031289	
Prob (F-statistic)	0.055021			

Lampiran 13

Uji Multikolinearitas

	PD	RD
PD	1.000000	0.204612
RD	0.204612	1.000000

Lampiran 14

Uji White

F-statistik	2.392815	Prob.F(5,24)	0.0185	
Obs*Rsquared	10.14367	Prob. Chi-Square(5)	0.3194	
Scaled explained SS	8.92564	Prob. Chi- Squared(5)	0.8154	
Tests Equation				
Dependent variable: RESID^2				
Method Least Squares				
Date: 03/20/18 Time 13:43				
Sample:1 30				
Included observations: 30				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	234.2157	267.7098	0.874887	0.3903
PD^RD	1.087648	0.409955	2.653093	0.0139
PD^RD	-0.664858	0.613128	-1.084368	0.2890
PD	-36.76119	24.10620	-1.524968	0.1403
RD^2	-0.035412	0.498147	-0.071087	0.9439
RD	17.69353	15.81216	1.118983	0.2742
R-Squared	0.414121	Mean Devendent var	0.674514	
Adjusted R-squared	0.292063	S.D Devendent var	2.203900	
S.E of regression	1.854340	Akaike info criterion	4.249791	
Sum squared resid	82.52580	Schwarz crerion	4.530030	

Lampiran 15

Uji Autokorelasi

R-Squared	0.364997	Mean Devendent var	24.73333
Adjusted R-squared	0.317960	S.D Devendent var	1.048261
S.E of regression	0.865714	Akaike info criterion	2.644114
Sum squared resid	20.23542	Schwarz crerion	2.784234
Log likelihood	-38.66171	Hannan-quinn criter	2.688940
F-statistik	7.759751	Durbin-watson stat	1.687960
Prob (F-statistic)	0.002175		

Lampiran 16

Uji t

Variable	coefficient	Stand. eror	t-statistik	Prob
PD	0.715358	0.182573	3.918201	0.0005
RD	-0.225789	0.187850	-1.101966	0.2398
C	13.17710	5.448806	2.418806	0.2226

Lampiran 17

Uji F

R-Squared	0364997	Mean Devendent var	24.73333
Adjusted R-squared	0.317960	S.D Devendent var	1.048261
S.E of regression	0.865714	Akaike info criterion	2.644114
Sum squared resid	20.23542	Schwarz crerion	2.784234
Log likelihood	-38.66171	Hannan-quinn criter	2.688940
F-statistik	7.759751	Durbin-watson stat	1.687960
Prob (F-statistic)	0.002175		

Lampiran 18

Uji R²

Devendent variable: PAD				
Method: panel least squares				
Date: 03/16/18 Time: 11.18				
Sample:2014 2016				
Periode included: 3				
Cross –section included: 10				
Total panel (balanced) observation: 30				
Variable	coeficient	Stand. eror	t-statistik	Prob
PD	0.715358	0.182573	3.918201	0.0005
RD	-0.225789	0.187850	-1.101966	0.2398
C	13.17710	5.448806	2.418806	0.2226
R-Squared	0364997	Mean Devendent var		24.73333
Adjusted R-squared	0.317960	S.D Devendent var		1.048261
S.E of regression	0.865714	Akaike info criterion		2.644114
Sum squared resid	20.23542	Schwarz crerion		2.784234
Log likelihood	-38.66171	Hannan-quinn criter		2.688940
F-statistik	7.759751	Durbin-watson stat		1.687960
Prob (F-statistic)	0.002175			